



WALI KOTA TANJUNGPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 54 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA AKSI PENGEMBANGAN  
KAWASAN MINAWISATA KAMPUNG MADONG-SEI NYIRIH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pengembangan ekonomi masyarakat dan wilayah yang berbasis pada pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan, perikanan dan pariwisata secara terintegrasi, Pemerintah Daerah perlu membuat dan menyusun kebijakan strategis yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang tertuang dalam rencana aksi daerah yang memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan ekonomi lokal berbasis minawisata;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Minawisata Kampung Madong-Sei Nyirih;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

7. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 157);
  14. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 14);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KAWASAN MINAWISATA KAMPUNG MADONG- SEI NYIRIH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra-produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
6. Minawisata adalah pengembangan kegiatan perekonomian masyarakat dan wilayah yang berbasis pada pemanfaatan potensi sumberdaya

kelautan, perikanan dan pariwisata secara terintegrasi pada suatu wilayah tertentu.

7. Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Minawisata Kampung Madong-Sei Nyirih adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang berfungsi sebagai acuan untuk mengembangkan Kawasan Minawisata Kampung Madong-Sei Nyirih secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran.
8. Kampung Madong-Sei Nyirih adalah Kawasan yang terletak pada Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang.

## Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Kawasan Minawisata Kampung Madong-Sei Nyirih.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mewujudkan kawasan minawisata Kampung Madong-Sei Nyirih yang mandiri dan berkelanjutan.
- (3) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:
  - a. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Minawisata Kampung Madong-Sei Nyirih;
  - b. Rencana Aksi;
  - c. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi; dan
  - d. Pendanaan.

## BAB II

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### PENGEMBANGAN KAWASAN MINAWISATA KAMPUNG MADONG-SEI NYIRIH

##### Bagian Kesatu

##### Strategi

## Pasal 3

Strategi pengembangan kawasan minawisata Kampung Madong-Sei Nyirih terdiri dari:

- a. membangun sarana dan prasarana kawasan minawisata Madong-Sei Nyirih;
- b. meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia pembudidaya perikanan, pengolah hasil perikanan dan pengelola minawisata;

- c. meningkatkan strategi pemasaran hasil perikanan dan objek wisata melalui perluasan digital;
- d. mengembangkan pengolahan hasil perikanan;
- e. memfasilitasi akses permodalan dan penyaluran bantuan;
- f. memberdayakan masyarakat dalam kegiatan edu-ekowisata;
- g. melakukan koordinasi dan meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan untuk pengembangan kawasan minawisata; dan
- h. membangun citra kawasan Kampung Madong-Sei Nyirih.

## Bagian Kedua

### Arah Kebijakan

#### Pasal 4

Arah kebijakan pengembangan kawasan minawisata Kampung Madong-Sei Nyirih dilaksanakan secara bertahap:

- a. tahap I diarahkan untuk pengembangan budidaya pesisir dan budidaya laut;
- b. tahap II diarahkan untuk pengembangan pengolahan, pengemasan dan pemasaran produk hasil perikanan dengan tujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sehingga mampu menghasilkan diversifikasi olahan produk perikanan;
- c. tahap III diarahkan untuk pengembangan kampung tematik eduwisata dan ekowisata melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan sehingga dapat memperluas dampak berkesinambungan dalam penguatan ekonomi lokal; dan
- d. Tahap IV lebih diarahkan untuk mengembangkan Kampung Madong-Sei Nyirih sebagai minawisata yang mandiri dan berkelanjutan sehingga menjadi pusat percontohan pengembangan kampung ikan.

## BAB III

### RENCANA AKSI

#### Pasal 5

- (1) Rencana Aksi pengembangan kawasan minawisata Kampung Madong-Sei Nyirih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah program yang diarahkan untuk pemenuhan pencapaian *output* dari arah kebijakan.

- (2) Rencana Aksi pengembangan kawasan minawisata Kampung Madong-Sei Nyirih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

##### Bagian Kesatu

##### Pelaksanaan

##### Pasal 6

- (1) Rencana Aksi pengembangan kawasan minawisata Kampung Madong-Sei Nyirih dilaksanakan secara terpadu, komprehensif, bertahap, berkelanjutan dan konsisten sesuai skala prioritas.
- (2) Rencana Aksi pengembangan kawasan minawisata Kampung Madong-Sei Nyirih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam dokumen sebagaimana tercantum dalam lampiran Wali Kota ini.
- (3) Pengembangan kawasan minawisata Kampung Madong-Sei Nyirih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pemangku kepentingan baik dari pemerintahan maupun non pemerintahan.

##### Bagian Kedua

##### Pemantauan dan Evaluasi

##### Pasal 7

- (1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan rencana aksi pengembangan kawasan minawisata Kampung Madong-Sei Nyirih dilakukan oleh Forum Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Forum Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain melakukan koordinasi, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan dan evaluasi rencana aksi pengembangan kawasan minawisata Kampung Madong-Sei Nyirih.
- (3) Evaluasi pengembangan kawasan minawisata Kampung Madong-Sei Nyirih dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan Rencana Aksi pengembangan kawasan minawisata Kampung Madong-Sei Nyirih, terdiri dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang;  
dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 25 Agustus 2023  
WALI KOTA TANJUNGPINANG

**ttd.**

RAHMA

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 25 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH,

**ttd.**

ZULHIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023 NOMOR 488

Salinan ini sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
LIA ADHAYATNI, SH.,MH  
Pembina  
NIP. 19781109 200604 2 021

## BAB 1

### PENDAHULUAN

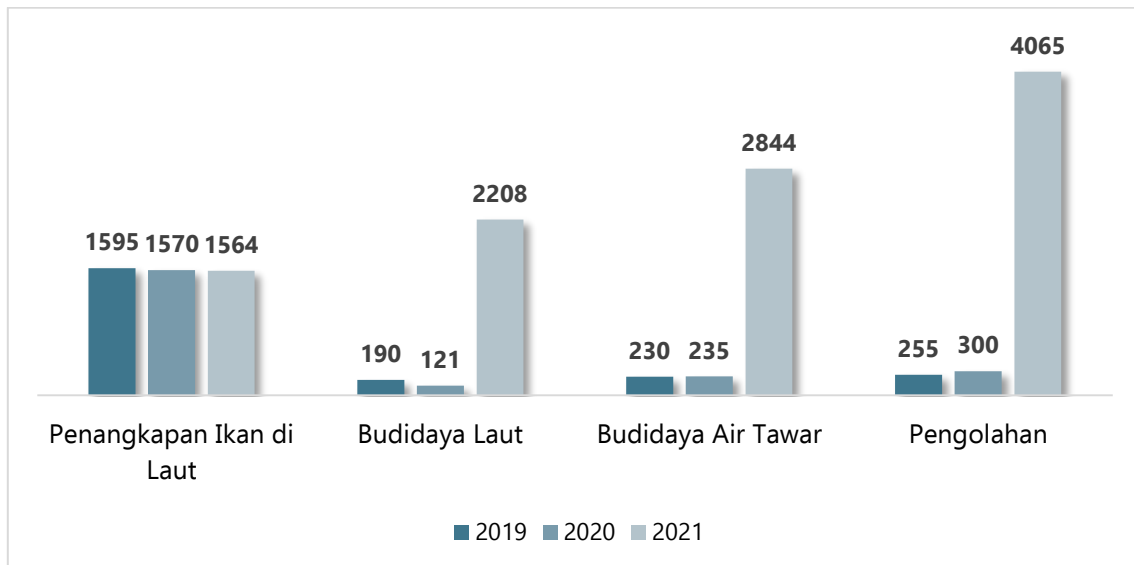
#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah untuk dimanfaatkan secara tepat, arif dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai negara kepulauan yang memiliki 17.504 pulau (Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir, 2021), dengan luas perairan sekitar 6,4 juta km<sup>2</sup> (Pushidrosal, 2018) atau sekitar dua per tiga dari luas wilayah Indonesia dan panjang garis pantai kurang lebih 108.000 km (Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut/Pushidrosal, 2018), menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta mendukung ketahanan pangan nasional. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara penghasil produk perikanan terbesar di dunia setelah Tiongkok, dengan produksi 24 juta ton per tahun. Selain itu, nilai sektor perikanan Indonesia mencapai 29,6 miliar dollar AS, memberikan kontribusi sebesar 2,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dan menyediakan 7 juta lapangan pekerjaan (<https://www.bkpm.go.id>).

Salah satu daerah di Indonesia dengan potensi maritim yang besar adalah Provinsi Kepulauan Riau, yang terdiri dari 2.408 pulau dengan garis pantai sepanjang 2.367,6 km. Potensi maritim tersebut antara lain berupa sumber daya kelautan dan perikanan, jasa transportasi pelayaran, perdagangan, energi berkelanjutan dan pariwisata. Berdasarkan Statistik Indonesia Tahun 2022, tercatat produksi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 sebesar 332.176 ton dengan nilai produksi mencapai 10,571 milyar rupiah.

Kota Tanjungpinang sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan Riau yang terletak di bagian selatan Pulau Bintan, dengan luas wilayah mencapai 144,56 km<sup>2</sup> berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, dan wilayah laut seluas 149,13 km<sup>2</sup> berdasarkan hitungan teknis dari Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007 (dengan mengabaikan batas wilayah kewenangan pengelolaan sejauh 12 mil laut), juga memiliki potensi kelautan dan perikanan yang perlu dikembangkan dengan lebih optimal.

Pada tahun 2021 tercatat 9.117 Rumah Tangga Perikanan (RTP) di Kota Tanjungpinang, meningkat 1289,79% dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 656 RTP. Peningkatan ini merupakan kenaikan yang signifikan selama periode tahun 2017 s.d 2021.



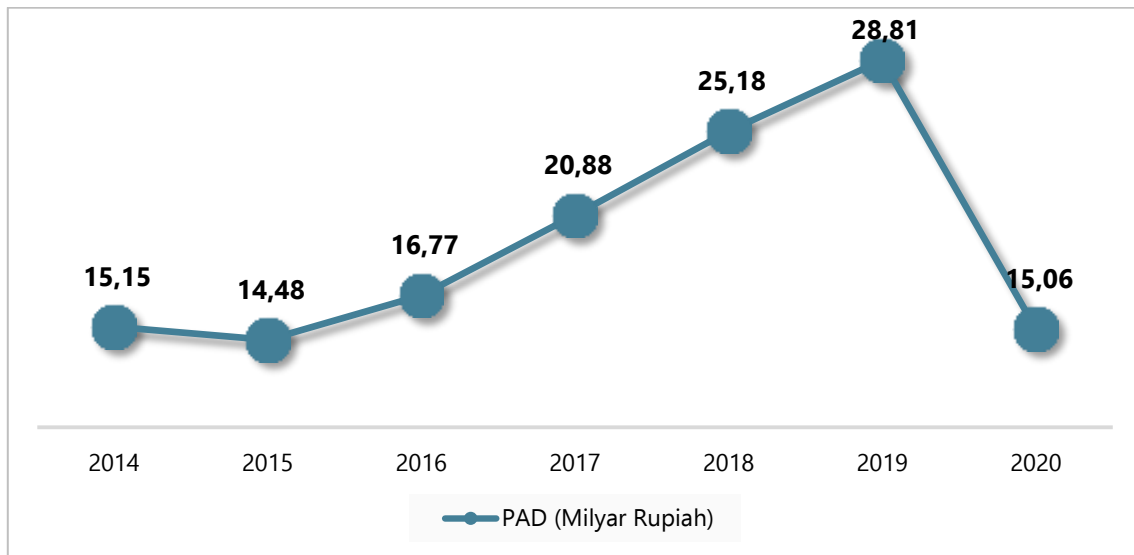
Sumber: BPS Kota Tanjungpinang, 2022

**Grafik 1.** Jumlah RTP Menurut Subsektor di Kota Tanjungpinang Tahun 2019 – 2021

Sebagai daerah maritim, perikanan tentu menjadi sektor yang penting di Tanjungpinang. Hal ini dapat dilihat dari hasil produksi perikanan pada tahun 2020 yang meningkat sebesar 12,88% dibanding tahun sebelumnya yaitu dari 561.203,33 ton menjadi 633.499,24 ton, dengan nilai produksi yang bertambah dari Rp. 96.974.783,- menjadi Rp. 105.788.941,- (BPS Kota Tanjungpinang, 2022). Sektor perikanan di Kota Tanjungpinang, yang terdiri dari Penangkapan ikan di laut, Budidaya laut, Budidaya air tawar, dan Pengolahan, mempunyai potensi nilai ekonomi yang besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan Kota Tanjungpinang Dalam Angka Tahun 2022, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan hanya menyumbang 0,71% dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tanjungpinang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021. Oleh karena itu, pendekatan pengembangan ekonomi lokal dengan berbasis perikanan diharapkan bisa menjadi konsep yang dapat dikembangkan dalam pembangunan di Kota Tanjungpinang, khususnya dengan bertumpu pada pengelolaan sumber daya perikanan secara optimal dan berkelanjutan.

Selain potensi sumber daya perikanan dan kelautan, daerah maritim Tanjungpinang juga memiliki potensi pariwisata berbasis kawasan pesisir dan laut. Menurut data Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang, terdapat 4 objek wisata alam dan 4 objek wisata bahari di Kota Tanjungpinang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang dari sektor pariwisata mengalami tren

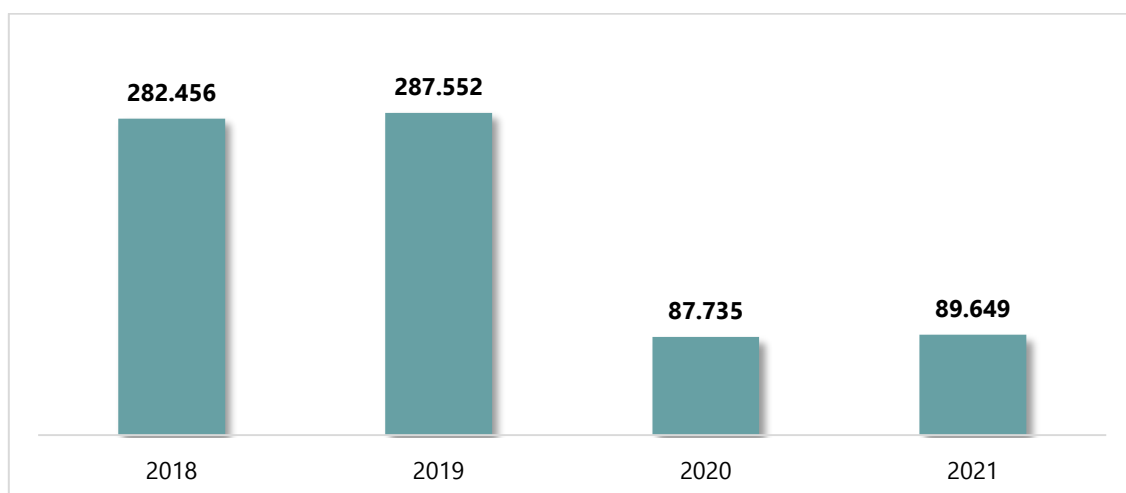
peningkatan setiap tahunnya dari 2014 s.d 2019, seperti yang terlihat pada Grafik 2. Penurunan signifikan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kota Tanjungpinang terjadi pada tahun 2020, hanya mencapai 15,06 milyar rupiah, yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang, 2021

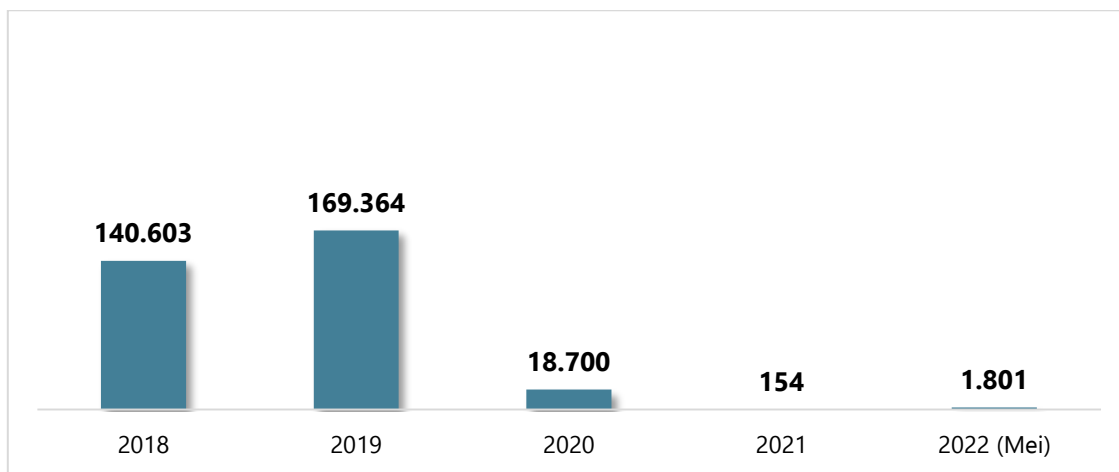
**Grafik 2.** PAD Kota Tanjungpinang dari Sektor Pariwisata

Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kota Tanjungpinang tahun 2021, jumlah kunjungan wisatawan ke Tanjungpinang, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara tahun 2018 s.d 2019 mengalami kenaikan yang cukup baik, namun dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan terjadinya penurunan yang signifikan, yaitu penurunan jumlah kunjungan wisatawan nusantara sebesar 69,49% dan penurunan jumlah wisatawan mancanegara sebesar 89,23%.



Sumber: LKPJ Kota Tanjungpinang, 2021

**Grafik 3.** Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Tahun 2018 - 2021



Sumber: LKPJ Kota Tanjungpinang, 2021

**Grafik 4.** Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2018 – 2022

Jika dilihat dari data pada Grafik 2., Grafik 3. dan Grafik 4. diatas, perkembangan pariwisata Kota Tanjungpinang sebelum pandemi Covid-19 menunjukkan tren yang cukup bagus, sehingga pariwisata menjadi salah satu sektor penting untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang yang berkontraksi sampai minus 3,45% pada tahun 2020.

Kota Tanjungpinang yang sebagian besar wilayahnya dikelilingi laut memiliki beberapa kawasan permukiman yang berada di pesisir, seperti Kampung Madong dan Kampung Sei Nyirih. Secara umum, topografi kedua kampung tersebut merupakan wilayah pesisir dengan jenis tanah berlumpur dan berkategori perairan estuari. Aktifitas perekonomian yang dapat dilakukan di kawasan pesisir Madong dan Sei Nyirih ini diantaranya adalah kegiatan perikanan (tangkap dan budidaya), industri dan pariwisata. Adapun potensi ekonomi yang dimiliki oleh Madong dan Sei Nyirih yang dapat dikembangkan secara optimal sebagai komoditas unggulan daerah, yaitu:

- a. Kampung Madong - Sei Nyirih merupakan daerah pesisir yang 60% wilayahnya berupa laut, berpotensi untuk perikanan tangkap dan kaya akan sumberdaya pesisir seperti kepiting bakau, gonggong dan udang (Susiana *et al.*, 2017). Ada beberapa upaya pembudidayaan gonggong yang telah berhasil dilakukan melalui pemijahan dan perkembangan larva di laboratorium dalam bak beton kapasitas 1 ton dengan perlakuan pergantian air sebanyak 90% setiap hari (Dody, 2012), pemijahan dalam wadah akuarium meskipun persentase induk yang memijah relatif rendah (Muzahar dan Hakim, 2018), dan perlakuan inkubasi suhu berbeda yang menghasilkan perlakuan suhu 31°C dengan hasil lebih baik dari perlakuan lainnya (Muzahar dan Viruly, 2020).

- b. Potensi perairan budidaya seluas 65,69 Ha, dapat dikembangkan untuk budidaya laut seperti kakap, kerapu, ikan belanak, ikan lebam, ikan sembilang, ketam renjong, ikan cermin, teripang dan rumput laut *Caulerpa sp* (Razai dan Putra, 2020).
- c. Potensi ± 98,50 Ha ekosistem mangrove dengan jenis flora yang beragam (Hidayat *et al.*, 2017) yang dapat dikembangkan menjadi wisata konservasi; dan
- d. Kawasan Danau Biru bekas tambang pasir seluas ± 64,37 Ha di Kampung Sei Nyirih yang dapat dikembangkan menjadi salah satu objek wisata daerah.

Disamping itu, berdasarkan potensi-potensi yang ada tersebut, Kampung Madong dan Kampung Sei Nyirih mempunyai karakteristik untuk dikembangkan sebagai suatu kawasan yang memadukan kegiatan perikanan dan pariwisata, dilihat dari keberadaan sentra perikanan budidaya air laut dan pesisir, perikanan tangkap nelayan tradisional, pengolahan produk perikanan, serta integrasi pada aspek ekowisata dan eduwisata yang dimiliki secara geografis. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya strategis meningkatkan ekonomi daerah serta percepatan pemulihan ekonomi masyarakat melalui keterpaduan potensi sumber daya kelautan, perikanan dan wisata bahari yang ada di Kampung Madong - Sei Nyirih dalam suatu model pengelolaan terpadu dengan prinsip berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan mata pencaharian masyarakat, atau dikenal juga sebagai konsep pengelolaan sumberdaya berbasis Minawisata. Upaya strategis ini juga berpedoman pada arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang menekankan prinsip-prinsip konsepsi “*Blue Economy*”, yaitu suatu pendekatan pengembangan ekonomi rakyat secara komprehensif dengan menekankan pada inovasi dan kreativitas untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan, sekaligus menjamin kelestarian sumber daya (Pauli, 2010).

Melalui konsep pengembangan kawasan yang terintegrasi antara aktifitas ekonomi di sektor perikanan dan sektor pariwisata yang berpusat pada kesejahteraan masyarakat, dengan memperhatikan aspek keberlanjutan ekologi melalui tata kelola sumberdaya yang baik, diharapkan dapat meningkatkan pembangunan perekonomian daerah, baik peningkatan ekonomi masyarakat lokal, maupun ekonomi Kota Tanjungpinang. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan suatu rencana aksi sebagai langkah awal dalam menentukan arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu disusun suatu kajian rencana aksi terkait pengembangan sumber daya perikanan dan kelautan berbasis minawisata di

Kota Tanjungpinang, dengan lokasi *pilot project* berada di Kampung Madong dan Kampung Sei Nyirih.

## **1.2 IDENTIFIKASI MASALAH**

Permasalahan dalam kajian Rencana Aksi Pengembangan Minawisata Kampung Madong – Sei Nyirih dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya pengembangan potensi ekosistem mangrove dan danau biru bekas tambang pasir sebagai objek wisata.
2. Minimnya hasil produksi perikanan tangkap dan budidaya dilihat dari jumlah produksi per tahun yang hanya mencapai 4.000 kg dari budidaya air laut dan 24.800 kg dari hasil tangkapan nelayan. Total produksi tersebut belum dapat memberikan nilai manfaat yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, karena untuk mencukupi kebutuhan konsumsi ikan sehari-hari masyarakat lokal Kampung Madong – Sei Nyirih saja, hanya mampu memenuhi sekitar 0,28 kg per rumah tangga.
3. Belum optimalnya pengolahan produk kelautan dan perikanan. Saat ini, produk olahan kelautan dan perikanan yang dihasilkan rata-rata per tahun hanya mencapai 814 kg dan produksi minyak gamat ±750 botol per tahun.
4. Jenis komoditas perikanan budidaya belum beragam. Jenis ikan yang sudah dibudidayakan saat ini antara lain, ikan lebam, ikan belanak, ikan kerapu, ikan merah, ikan sembilang.
5. Belum optimalnya pengembangan paket ekowisata mangrove yang hanya terdiri dari 40 trip per tahun.

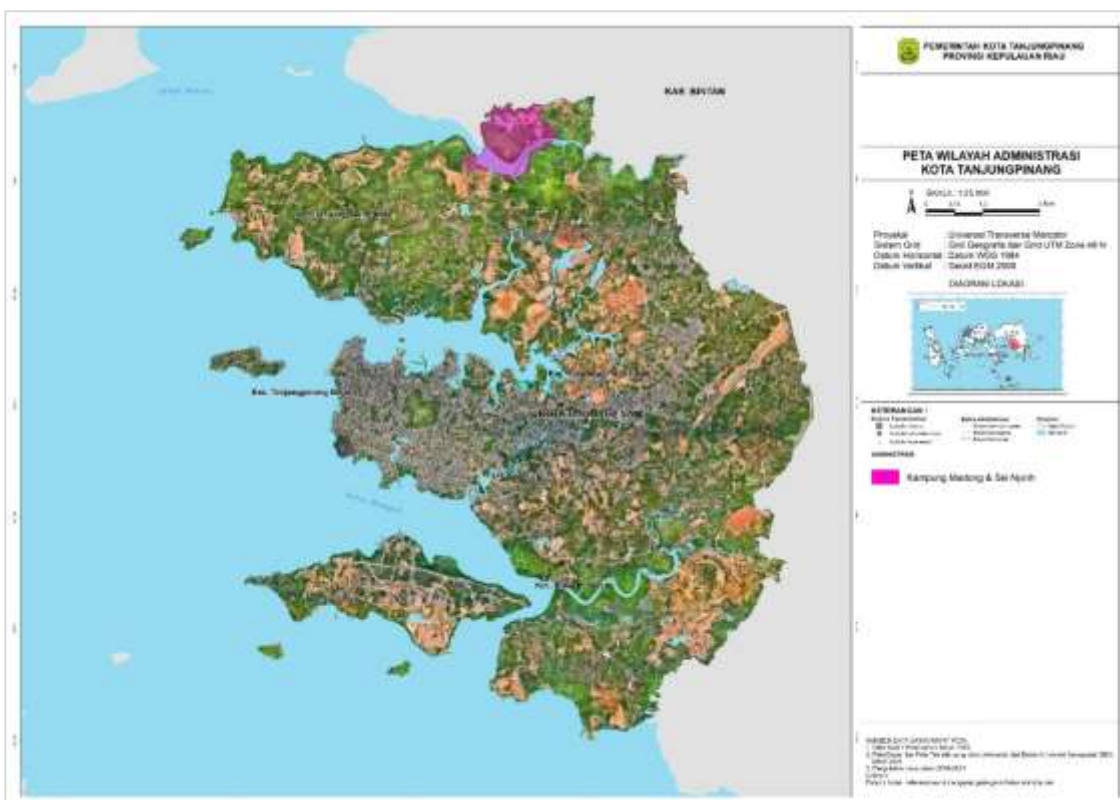
## **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Kajian Rencana Aksi Pengembangan Minawisata Kampung Madong – Sei Nyirih ini dimaksudkan untuk menyusun strategi dan arah kebijakan pengembangan ekonomi lokal berbasis minawisata, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tanjungpinang khususnya Kampung Madong dan Kampung Sei Nyirih.

## BAB 2 GAMBARAN UMUM

Kampung Madong dan Kampung Sei Nyirih berada di RW 5 (RT 1 dan RT 2) Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dengan jumlah KK sebanyak 246 dan luas wilayah  $\pm 2,85 \text{ km}^2$ . Secara geografis, lokasi Kampung Madong - Sei Nyirih berada pada  $0^{\circ}58'20''$  Lintang Utara dan  $104^{\circ}28'06''$  Bujur Timur sampai dengan  $0^{\circ}59'12''$  Lintang Utara dan  $104^{\circ}29'16''$  Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tembeling, Kabupaten Bintan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tanjungpinang Kota;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Air Raja; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Senggarang



**Gambar 1.** Peta Lokasi Kampung Madong – Sei Nyirih

### 2.1 Iklim

Pada umumnya Kampung Madong – Sei Nyirih beriklim tropis, dengan suhu udara rata-rata sekitar 26,5 derajat celsius dan kelembaban udara rata-rata sekitar 82 persen, dengan rata-rata curah hujan 257,6 mm dan tekanan udara 1010,1 mb.

### 2.2 Kondisi Fisik Alam

Secara topografi, Kampung Madong merupakan daerah pesisir dengan jenis tanah berlumpur dan kategori perairan estuary, terdiri dari 60% laut dan 40%

daratan. Kampung Madong memiliki wilayah seluas 92,96 Ha yang terdiri dari perairan budidaya 65,69 Ha, luas perkampungan yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pengolahan hasil perikanan 15,5 Ha dan luas mangrove 11,77 Ha. Kondisi fisik kawasan Kampung Madong berpotensi untuk budidaya laut seperti kakap, kerapu, ikan belanak, ikan lebam, ikan sembilang, ketam renjong, ikan cermin, teripang, dan rumput laut *Caulerpa sp* (Razai dan Putra, 2020). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ismail *et al.* (2018), perairan Kampung Madong baik fisika maupun kimia pada saat pasang dan surut masih berada pada kriteria baku mutu air laut untuk biota laut yang dipersyaratkan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut untuk Biota Air Laut. Tingkat kesuburan perairan Kampung Madong berdasarkan nilai indeks TRIX (*trophic index*) tergolong sedang (mesotrofik) pada saat pasang, dan tergolong tinggi (eutrofik) pada saat surut. Secara tabular, kondisi kesuburan perairan Kampung Madong dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.** Kondisi Kesuburan Perairan Kampung Madong

| Parameter                     | Satuan | Rata-rata Hasil Pengukuran |                | Baku Mutu* |
|-------------------------------|--------|----------------------------|----------------|------------|
|                               |        | Pasang                     | Surut          |            |
| <b>Fisika</b>                 |        |                            |                |            |
| <b>Suhu</b>                   | °C     | 29,17 ± 0,18               | 28,8 ± 0,33    | Alami      |
| <b>Kecerahan</b>              | m      | 2,39 ± 0,15                | 1,47± 0,17     | Lamun>3    |
| <b>Kecepatan Arus</b>         | m/s    | 0,05 ± 0,01                | 0,06± 0,01     | -          |
| <b>Kimia</b>                  |        |                            |                |            |
| <b>Salinitas</b>              | %      | 23,07 ± 1,10               | 22,73 ± 1,33   | Alami      |
| <b>Oksigen Terlarut (DO)</b>  | mg/L   | 6,75 ± 0,30                | 6,69 ± 0,329   | >5         |
| <b>Derajat Keasaman(pH)</b>   |        | 7,38 ± 0,07                | 7,13 ± 0,08    | 7-8,5      |
| <b>Nitrat(NO<sub>3</sub>)</b> | mg/L   | 0,4327 ± 0,066             | 0,4333 ± 0,196 | 0,008      |
| <b>Fosfat(PO<sub>4</sub>)</b> | mg/L   | 0,020± 0,007               | 0,104 ± 0,202  | 0, 015     |
| <b>Biologi</b>                |        |                            |                |            |
| <b>Klorofil-a</b>             | mg/L   | 3,49± 1,36                 | 4,87± 1,65     |            |

Ket(\*): Baku Mutu Air laut Untuk Biota Laut KepMen LH No.51 Tahun 2004

Sumber: Ismail *et al.*, (2018)

Kampung Sei Nyirih yang letaknya berdekatan dengan Kampung Madong juga merupakan daerah pesisir. Secara topografi ketinggian Kampung Sei Nyirih dari permukaan air laut adalah 10 MDPL dengan kontur tanah kategori landai. Wilayah ini secara keseluruhan memiliki luas 192,41 Ha, dengan perkampungan Sei Nyirih seluas 41,31 Ha. Sebagian besar Kampung Sei Nyirih banyak ditumbuhi oleh hutan mangrove dengan luas 86,73 Ha yang masih terjaga dengan baik kelestariannya, sehingga berpotensi untuk budidaya pesisir seperti ketam bakau, gonggong, dan udang. Selain itu, di Kampung Sei Nyirih juga terdapat kawasan danau biru bekas galian tambang dengan luas 64,37 Ha, serta perkebunan nanas seluas 7,80 Ha dengan hasil yang diperoleh mencapai 14,90 ton per tahun, dan perkebunan karet seluas 7,80 Ha dengan hasil mencapai 3,5 ton per tahun.

**Tabel 2.** Luas Wilayah Kampung Madong – Sei Nyirih

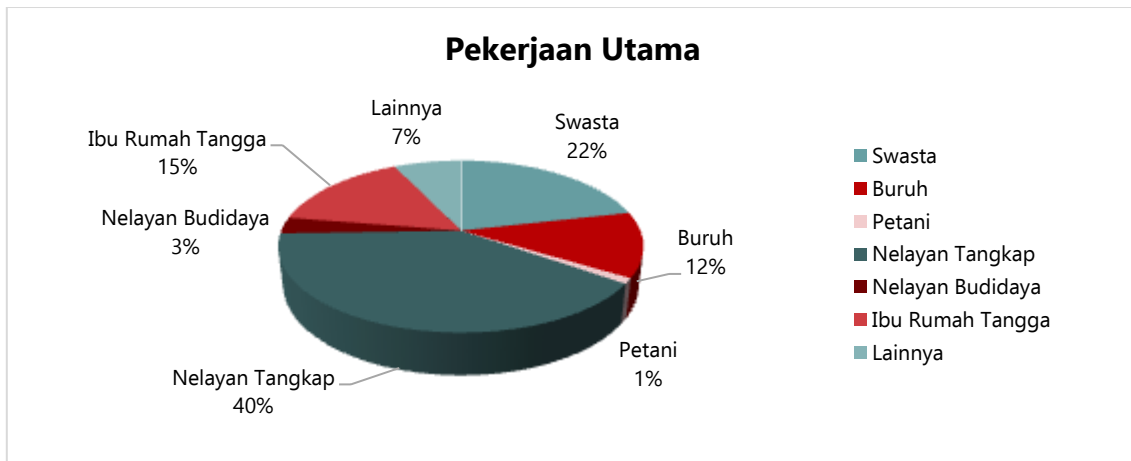
| No.                              | Keterangan  | Luas (Ha)     |
|----------------------------------|---|---------------|
| <b>Kampung Madong :</b>          |   |               |
| 1.                               | Perairan dan Budidaya Laut                        | 65,69         |
| 2.                               | Perkampungan dan Lokasi Pengolahan Kampung Madong | 15,50         |
| 3.                               | Kawasan Mangrove (Laboratorium Alam)              | 11,77         |
| <b>Total luas Kampung Madong</b> |   | <b>92,96</b>  |
| <b>Kampung Sei Nyirih :</b>      |   |               |
| 1.                               | Kawasan Danau Biru (Bekas Tambang Pasir)          | 64,37         |
| 2.                               | Perkampungan dan Lokasi Pengolahan                | 41,31         |
| 3.                               | Kawasan Mangrove (Laboratorium Alam)              | 86,73         |
| <b>Total luas Kampung Madong</b> |   | <b>192,41</b> |

*Sumber: Hasil Analisis, 2022*

### **2.3 Kondisi Sosial-Ekonomi**

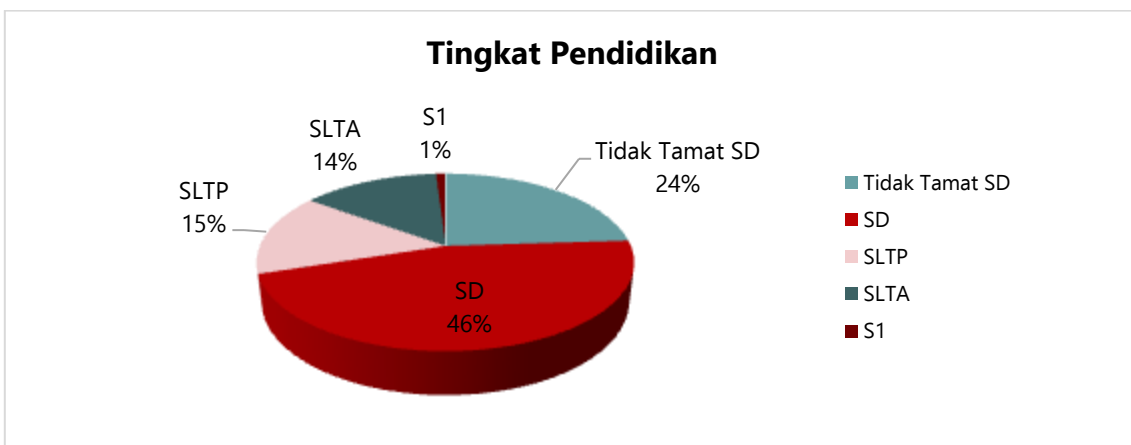
Secara umum masyarakat di Kampung Madong – Sei Nyirih bermata pencaharian sebagai nelayan, pekerja swasta, pengolah hasil perikanan (kerupuk dan minyak gamat), buruh, dan sebagian kecil sebagai pembudidaya, wiraswasta dan petani. Mayoritas kepala keluarga berpendidikan Sekolah Dasar (SD) atau sebesar 46%, dan sebagian lainnya memiliki tingkat pendidikan sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), namun masih banyak juga kepala keluarga yang tidak tamat SD yaitu sebesar

24% dan hanya sebagian kecil yang berpendidikan Sarjana (S1). Sebagian besar atau 53,29% penghasilan rata-rata per bulan kepala keluarga berkisar antara Rp. 1 juta s.d 3 Juta, dan sekitar 73% rumah tangga di Kampung Madong – Sei Nyirih telah memiliki rumah sendiri. Adapun kondisi sosial ekonomi masyarakat Kampung Madong dan Kampung Sei Nyirih dapat dilihat pada grafik berikut.



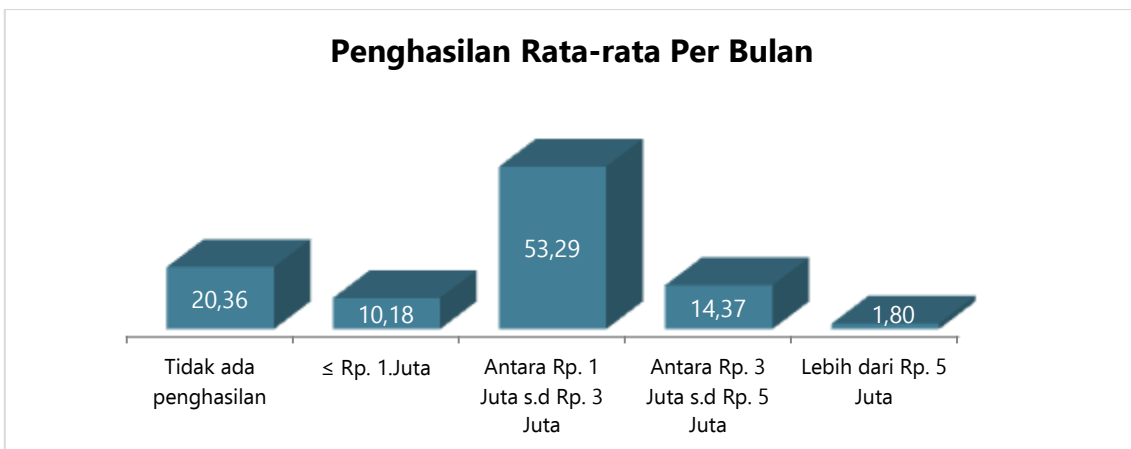
Sumber: Hasil Analisis, 2022

**Grafik 5.** Pekerjaan Utama Kepala Keluarga di Kampung Madong – Sei Nyirih



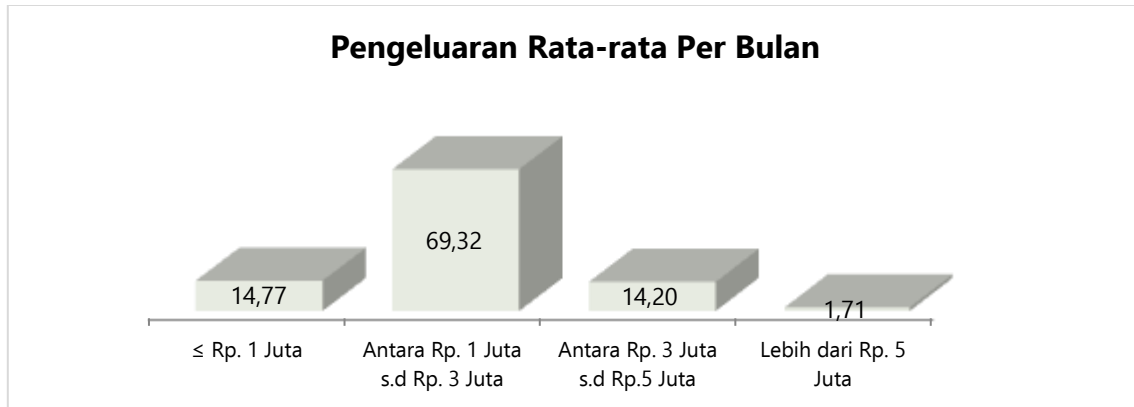
Sumber: Hasil Analisis, 2022

**Grafik 6.** Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga di Kampung Madong – Sei Nyirih



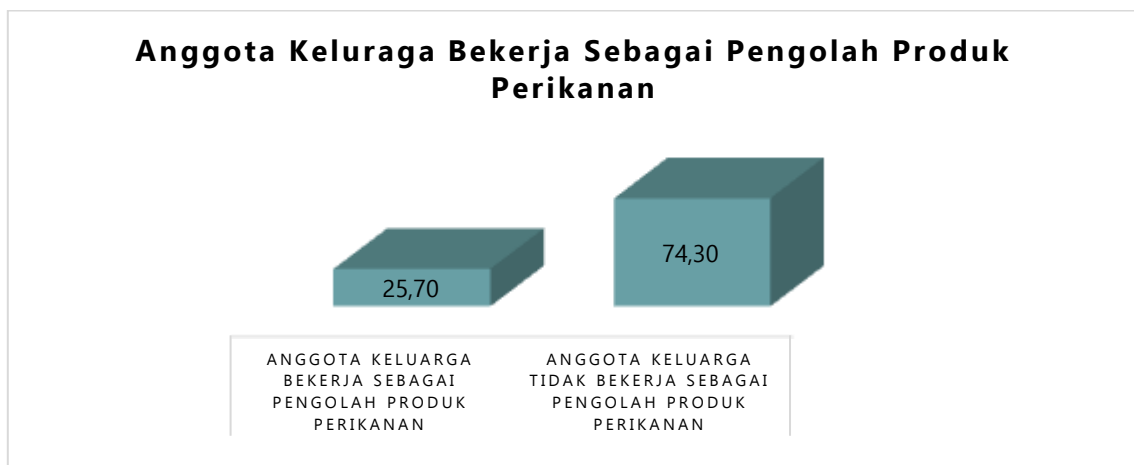
Sumber: Hasil Analisis, 2022

**Grafik 7.** Penghasilan Per Bulan Kepala Keluarga di Kampung Madong – Sei Nyirih



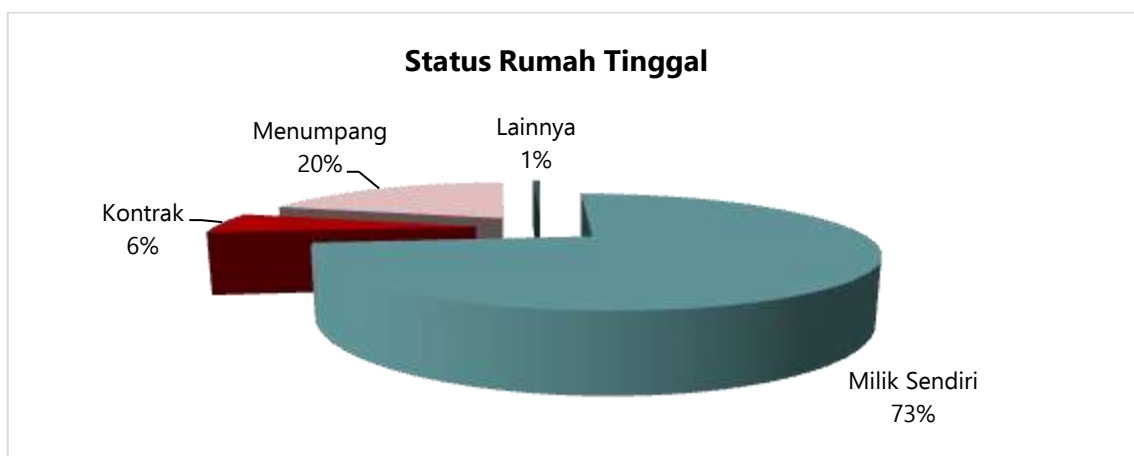
Sumber: Hasil Analisis, 2022

**Grafik 8.** Pengeluaran Per Bulan Rumah Tangga di Kampung Madong – Sei Nyirih



Sumber: Hasil Analisis, 2022

**Grafik 9.** Persentase Anggota Keluarga Bekerja sebagai Pengolah Produk Perikanan di Kampung Madong – Sei Nyirih



Sumber: Hasil Analisis, 2022

**Grafik 10.** Status Rumah Tinggal Masyarakat Kampung Madong – Sei Nyirih

## 2.4 Kondisi Infrastruktur

Infrastruktur merupakan pendukung utama aktivitas sosial ekonomi keseharian, meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat dan mendorong pembangunan kawasan. Tersedianya infrastruktur yang memadai akan dapat mengembangkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam secara optimal. Pada pembahasan ini, infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menggambarkan mengenai kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkungan sosial dan ekonomi.

Kondisi bangunan gedung di Kampung Madong – Sei Nyirih ditinjau dari ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan, dan kualitas bangunan, yang secara umum dapat digambarkan sebagai berikut



**Gambar 2.** Kondisi Bangunan Gedung di Kampung Madong – Sei Nyirih

Ditinjau dari ketidakteraturan bangunan di Kampung Madong – Sei Nyirih, bangunan yang ada di kawasan ini memiliki perletakan bangunan menghadap wajah jalan sehingga menggambarkan kondisi keteraturan bangunan yang baik. Kepadatan bangunan sebanyak 22 unit bangunan per Hektar dengan tingkat kepadatan bangunan rendah menggambarkan bahwa kepadatan bangunan masih sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang. Adapun kondisi bangunan gedung pada permukiman memiliki kualitas yang baik dengan bangunan berstruktur beton.

Kondisi jalan lingkungan di Kampung Madong – Sei Nyirih ditinjau dari pelayanan seluruh lingkungan dan kualitas jalan lingkungan, yang secara umum



dapat digambarkan sebagai berikut.

**Gambar 3.** Kondisi Jalan Lingkungan di Kampung Madong – Sei Nyirih

Jaringan jalan lingkungan di Kampung Madong – Sei Nyirih tidak melayani seluruh lingkungan permukiman, terdapat ± 182 meter jalan tanpa perkerasan. Ditinjau dari kualitas permukaan jalan lingkungan, pada kawasan ini kondisi seluruh jalan lingkungan tidak terjadi kerusakan permukaan jalan yang meliputi retak dan perubahan bentuk.

Kondisi penyediaan air minum ditinjau dari akses air minum yang tersedia dan terpenuhinya kebutuhan air setiap individu di Kampung Madong – Sei Nyirih, terdapat 2 (dua) unit sumur bersama. Akan tetapi, sumur tersebut tidak dapat melayani masyarakat karena kualitas air tidak memenuhi standar berupa air yang payau. Masyarakat memanfaatkan sumur pribadi dalam upaya memenuhi kebutuhan air minimal setiap individu.

Kondisi drainase lingkungan di Kampung Madong – Sei Nyirih ditinjau dari drainase lingkungan yang tidak tersedia, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan, dan kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk, yang secara umum dapat digambarkan sebagai berikut.



**Gambar 4.** Kondisi Drainase Lingkungan di Kampung Madong – Sei Nyirih

Drainase tidak tersedia sepanjang  $\pm 593$  meter dilihat dari saluran tersier dan/atau saluran lokal yang tidak tersedia dan/atau kualitas konstruksi drainase yang buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan. Pada Kampung Madong – Sei Nyirih terjadi genangan yang diakibatkan oleh banjir pasang surut air laut pada area seluas  $\pm 6.314 \text{ m}^2$  dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 (dua) jam dan terjadi lebih dari 2 (dua) kali dalam setahun.

Kondisi pengelolaan air limbah ditinjau dari sarana dan prasarana air limbah. Di Kampung Madong – Sei Nyirih terdapat masyarakat yang bermukim di atas laut, dengan kondisi sarana dan prasarana pengelolaan air limbah berupa kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangka septik, serta tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat. Sedangkan, kondisi pengelolaan persampahan di Kampung Madong – Sei Nyirih ditinjau dari sarana dan prasarana persampahan. Pada kawasan tersebut tidak terdapat sarana pengangkut sampah pada skala lingkungan dan Tempat Pengumpulan Sampah (TPS), sehingga masyarakat mengangkut sampah rumah tangga menuju kawasan lain yang memiliki prasarana persampahan.

Kondisi proteksi kebakaran di Kampung Madong – Sei Nyirih ditinjau dari sarana dan prasarana proteksi kebakaran, serta tersedianya prasarana proteksi kebakaran berupa jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran. Namun, pada kawasan ini tidak memiliki sarana proteksi kebakaran berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

## **2.5 Potensi Kampung Madong – Sei Nyirih**

Kampung Madong - Sei Nyirih memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan, diantaranya sumberdaya kelautan dan perikanan serta daya tarik wisata yang dapat dipadukan melalui strategi pengembangan minawisata dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat lokal. Selain memiliki lahan potensial untuk budidaya perikanan, di Kampung Madong – Sei Nyirih juga terdapat komoditas unggulan perikanan budidaya laut dan pesisir yang dapat dikembangkan, serta memiliki potensi alam berupa ekosistem mangrove yang dapat menjadi salah satu objek wisata berbasis konservasi (*edu-eco* wisata) di Kota Tanjungpinang. Potensi SDM perikanan dapat dilihat dari jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) yang ada, jumlah pelaku usaha dalam pengolahan produk perikanan, serta adanya kelompok usaha dan koperasi perikanan.

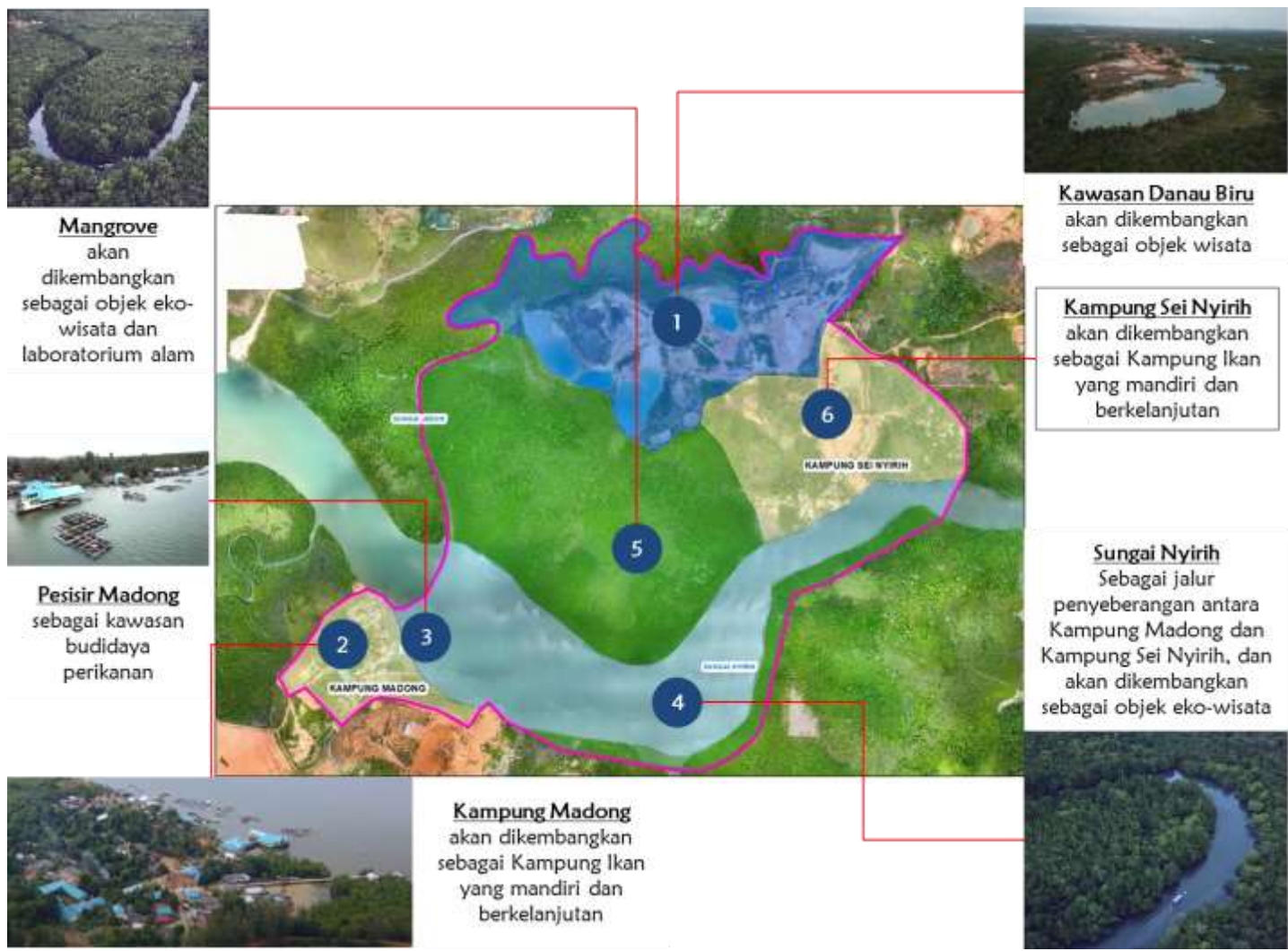
**Tabel 3.** Potensi Kampung Madong – Sei Nyirih

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Luas Lahan Budidaya Potensial</b>  | Keramba Jaring Apung<br>(HDPE : 60 Unit - 3x3 M)<br>(KJA Kayu : 46 Unit 3x3 M)<br>(KJA Kayu : 40 Unit 2x2 M)<br>(KJA Kayu : 16 Unit 2x1.5 M)   |
| <b>Komoditas Unggulan</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budidaya Laut : Kakap, Kerapu, Ikan Belanak, Ikan Lebam, Ikan Sembilang, Ketam Renjong, Ikan Cermin, Teripang, Rumput Laut</li> <li>• Budidaya Pesisir : Udang, Gonggong, Ketam Bangkang/Ketam Bakau</li> </ul> |
| <b>Produk Pariwisata</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tour Mangrove dan Laboratorium Alam</li> <li>• Kawasan Danau Biru</li> <li>• Produk Olahan Kelautan dan Perikanan (Pokdarwis Kelurahan Kampung Bugis)</li> </ul>  |
| <b>Produk Olahan Perikanan</b>        | Kerupuk ikan, Minyak gamat, Kerajinan, dan lain-lain   |
| <b>Nelayan Perikanan Budidaya</b>     | 11 RTP   |
| <b>Nelayan Perikanan Tangkap</b>      | 83 RTP   |
| <b>Pengolah Produk Perikanan</b>      | 17 Pelaku Usaha  |
| <b>Kelompok Usaha Bersama</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 Kelompok Pembudidaya (35 orang)</li> <li>• 1 Kelompok Nelayan Tangkap (KUB Nelayan Ketam)</li> <li>• 1 Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan (Mekar Makmur)</li> </ul>   |
| <b>Koperasi Perikanan</b>             | 2 Unit (Koperasi Perikanan Usaha Bersama dan Koperasi Perikanan Budi Mulya)  |
| <b>Fasilitas Pendukung Pariwisata</b> | Rumah Makan Seafood  |

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang, 2022

Disamping itu, Kampung Madong dan Kampung Sei Nyirih juga memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan secara optimal dalam mendukung pengembangan minawisata, yaitu:

- a. Daerah pesisir Madong dan Sei Nyirih yang 60% wilayah nya berupa laut, berpotensi untuk perikanan tangkap, serta kaya akan sumberdaya pesisir seperti kepiting bakau, gonggong dan udang, yang dapat dikembangkan sebagai kawasan budidaya pesisir.
- b. Perairan budidaya seluas 65,69 Ha, dapat dikembangkan untuk budidaya perikanan laut.
- c. Ekosistem mangrove seluas  $\pm$  98,50 Ha dengan jenis flora yang beragam yang dapat dikembangkan sebagai objek wisata konservasi dan laboratorium alam.
- d. Kawasan Danau Biru bekas tambang pasir seluas  $\pm$  64,37 Ha di Kampung Sei Nyirih yang dapat dikembangkan menjadi salah satu objek wisata daerah.
- e. Sungai Nyirih sebagai jalur penyeberangan antara Kampung Madong dan Sei Nyirih yang dapat dikembangkan menjadi objek eko- wisata.



**Gambar 5.** Delineasi Kawasan Pengembangan Kampung Madong – Sei Nyirih

## BAB 3 LANDASAN TEORI

### 3.1. *Blue Economy*

Menurut Brears (2021), *blue economy* dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan sumber daya kelautan berkelanjutan yang merupakan bagian dari ruang lingkup sektor ekonomi dan kebijakan terkait. Tantangan penting dari *blue economy* adalah perlunya memahami dan mengelola dengan baik aspek-aspek pemanfaatan berkelanjutan kelautan, mulai dari perikanan berkelanjutan, kesehatan ekosistem hingga polusi. Ekonomi biru terdiri dari penangkapan ikan dan akuakultur berkelanjutan, bioteknologi kelautan, energi terbarukan kelautan, pengelolaan sumber air pesisir, inisiatif blue carbon, dan adaptasi berbasis ekosistem.

Meskipun fokus aktivitas *blue economy* di tiap negara akan berbeda-beda, namun tetap mengacu pada tujuan sebagai berikut :

- a. Memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi generasi sekarang dan yang akan datang
- b. Mengembalikan, melindungi, dan memelihara keragaman, produktivitas, ketahanan, fungsi inti, dan nilai intrinsik ekosistem laut
- c. Mempromosikan teknologi bersih, energi terbarukan, dan prinsip ekonomi yang memisahkan pertumbuhan ekonomi dari sumber daya konsumsi, mengurangi limbah, dan mendaur ulang material.

Fokus pembangunan Kelautan dan Perikanan pada industrialisasi kelautan dan perikanan dengan pendekatan *blue economy* adalah melalui peningkatan nilai tambah dan sinergi hulu-hilir, berbasis pada komoditas, dan menuntut dukungan teknologi handal hasil penelitian (KKP, 2022).

Menurut Prasutiyon (2018), beberapa isu-isu dalam menjalankan konsep *blue economy* adalah:

- a. Pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati.

Pendekatan ekosistem diperlukan agar faktor dalam pemulihan keanekaragaman hayati dan terbarukan dapat terlaksana. Hal ini dikarenakan eksploitasi besar-besaran sumber hayati tanpa memikirkan dampak yang timbul akan memberikan ancaman pada kerusakan lingkungan.

- b. Keamanan pangan

Dalam konteks ketahanan pangan *blue economy* sangat erat terkait dengan kelanjutan penggunaan keanekaragaman hayati, terutama yang berkaitan dengan eksploitasi perikanan ilegal. Masyarakat di negara-negara berkembang sangat tergantung pada makanan laut sebagai sumber protein utama,

sehingga budidaya sumber daya hayati berpotensi dalam penyediaan makanan dan mata pencaharian masyarakat bagi negara berkembang.

c. Perikanan berkelanjutan.

Budidaya merupakan sektor sumber makanan yang berkontribusi sebesar 47% pada konsumsi ikan secara global. Dalam Tiga dekade terakhir ini telah terlihat perkembangan metode penggunaan akuakultur sehingga mampu memberikan jaminan keamanan pangan pada masyarakat global.

d. Laut dan wisata pantai.

Wisata bahari dan pantai adalah kunci penting untuk negara-negara berkembang meskipun terjadi krisis ekonomi global. Data menunjukkan bahwa kedatangan wisatawan internasional meningkat sebesar 4% menjadi 1 miliar lebih pada tahun 2012, dan menghasilkan US \$1,3triliun pendapatan global. Namun, pariwisata menjadi tantangan tersendiri dalam hal peningkatan emisi gas rumah kaca, air konsumsi, limbah, serta degradasi habitat pesisir, keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem.

e. Tata kelola dan kerjasama internasional.

Setiap negara berdaulat bertanggung jawab atas sumber daya sendiri dan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu pendekatan berbasis ilmu pengetahuan sangat penting untuk perkembangan *blue economy*, sebagai dasar pengambilan keputusan dan manajemen adaptif. Usaha ini harus terus disempurnakan dan ditingkatkan sejalan dengan perubahan keadaan dan perkembangan teknologi.

### **3.2. Minawisata**

Istilah minawisata berasal dari kata mina yang artinya perikanan dan wisata yang artinya pariwisata. Secara singkat, minawisata dapat diartikan sebagai konsep pendekatan pengelolaan terpadu yang berbasis konservasi dengan menitikberatkan pada pengembangan perikanan dan pariwisata bahari.

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan di dalam Pino (2013), minawisata adalah pengembangan kegiatan perekonomian masyarakat dan wilayah yang berbasis pada pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan, perikanan dan pariwisata secara terintegrasi pada suatu wilayah tertentu. Pada tahap awal, minawisata dikemas dalam bentuk satu program pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan potensi sumberdaya perikanan dan pariwisata berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut yaitu: emisi karbon yang rendah, ramah lingkungan, sesuai daya dukung dan daya tampung, konservasi (penggunaan sumberdaya secara efisien), berbasis sumberdaya lokal, dan pelibatan *stakeholders* lokal terkait.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, disebutkan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra-produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Dalam sistem bisnis perikanan, seringkali digunakan kata Mina untuk menggantikan kata Perikanan yang pada hakekatnya mengandung pengertian yang sama dengan kata perikanan itu sendiri. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat nelayan dan juga masyarakat lainnya yang hidup di wilayah pesisir. Wisata merupakan satu bentuk pemanfaatan sumberdaya alam yang mengandalkan jasa alam untuk kepuasan manusia.

Dalam mengembangkan kawasan minawisata dibutuhkan dukungan teknis dan politis, dukungan regulasi, kajian dan riset baik dari para peneliti, akademisi maupun praktisi dan lembaga swadaya masyarakat. Tidak kalah penting adalah dukungan pihak swasta/dunia usaha sebagai calon investor. Selain itu, juga diperlukan kerjasama yang sinergis dengan *stakeholders* terkait.

### **3.3. Wisata Edukasi (Eduwisata)**

Menurut Suwanto (1997), wisata edukasi adalah suatu perjalanan wisata yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran, studi perbandingan ataupun pengetahuan mengenai bidang kerja yang dikunjunginya. Wisata jenis ini juga sebagai *study tour* atau perjalanan kunjungan-kunjungan pengetahuan.

Wisata edukasi yang kemudian dikenal sebagai *edutourism* atau eduwisata memadukan konsep pariwisata dengan pendidikan, menyajikan nilai-nilai pendidikan yang diramu dalam paket-paket *tour* guna mewujudkan suasana pendidikan yang menyenangkan dalam suatu perjalanan wisata dan memberikan informasi pengetahuan pada ilmu kealaman, sosial dan budaya serta pengembangan imajinasi dan kreatifitas. Menurut Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan Konservasi Alam, eduwisata merupakan diversifikasi daya tarik wisata dari wisata alam (ekowisata) yang bertujuan untuk memperluas dan memperbanyak produk wisata alam. Terdapat 4 jenis wisata edukasi, yaitu:

- a. Wisata edukasi *science* yaitu wisata berbasis pendidikan ilmu pengetahuan.
- b. Wisata edukasi olahraga yaitu wisata berbasis kepada pendidikan fisik.
- c. Wisata edukasi budaya seperti seni, adat istiadat dan lain yang berhubungan dengan kebudayaan.
- d. Wisata edukasi agro yang berbasis kepada pendidikan pertanian dan peternakan.

### 3.4. Ekowisata

Secara definitif, ekowisata adalah suatu konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan yang konservatif, sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat (Ditjen Pariwisata, 1995). Ekowisata merupakan kegiatan wisata yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan. Ekowisata dapat memberikan banyak manfaat, seperti sumber pendanaan bagi kawasan konservasi, perlindungan kawasan konservasi, alternatif sumber mata pencaharian masyarakat lokal, pilihan untuk mempromosikan konservasi dan dorongan upaya konservasi secara khusus.

Menurut prinsip dasarnya, manfaat ekowisata meliputi:

- a. Mencegah dan menanggulangi dampak dari aktivitas wisatawan terhadap alam dan budaya; pencegahan dan penanggulangan disesuaikan dengan sifat dan karakter alam dan budaya setempat;
- b. Pendidikan konservasi lingkungan; mendidik pengunjung dan masyarakat sekitar akan pentingnya konservasi;
- c. Pendapatan langsung untuk kawasan; restribusi atau pajak konservasi (*conservation tax*) dapat digunakan untuk pengelolaan kawasan konservasi;
- d. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan; merangsang masyarakat agar terlibat dalam perencanaan dan pengawasan kawasan;
- e. Penghasilan bagi masyarakat; masyarakat mendapat keuntungan ekonomi sehingga terdorong untuk menjaga kelestarian kawasan;
- f. Menjaga keharmonisan dengan alam; kegiatan dan pengembangan fasilitas tetap mempertahankan keserasian dan keaslian alam;
- g. Daya dukung sebagai batas pemanfaatan; daya tampung dan pengembangan fasilitas hendaknya mempertimbangkan daya dukung lingkungan;
- h. Kontribusi pendapatan bagi Negara (pemerintah daerah dan pusat).

Manfaat ekowisata berdampak dalam berbagai aspek. Manfaat tersebut meliputi aspek konservasi, pemberdayaan dan pendidikan lingkungan. Manfaat tersebut secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a. Konservasi. Keterkaitan ekoturisme dan satwa terancam punah sangat erat, bahkan harus bersifat positif, sebagaimana studi yang dilakukan oleh peneliti Universitas Griffith. Wisata berkorelasi positif dengan konservasi berarti memberikan insentif ekonomi yang efektif untuk melestarikan, meningkatkan keanekaragaman hayati budaya, melindungi warisan alam serta budaya di planet bumi.

- b. Pemberdayaan ekonomi. Ekoturisme melibatkan masyarakat lokal berarti meningkatkan kapasitas, kesempatan kerja masyarakat lokal. Konsep ekowisata adalah sebuah metode yang efektif untuk memberdayakan masyarakat lokal di seluruh dunia guna melawan kemiskinan, mencapai pembangunan berkelanjutan.
- c. Pendidikan lingkungan. Melibatkan pendidikan lingkungan berarti kegiatan wisata yang dilakukan harus memperkaya pengalaman, juga kesadaran lingkungan melalui interpretasi. Kegiatan harus mempromosikan pemahaman, penghargaan yang utuh terhadap alam, masyarakat, budaya setempat.

Menurut Damanik dan Weber (2006), terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam pengembangan ekowisata, yaitu:

- a. Mengurangi dampak negatif berupa kerusakan atau pencemaran lingkungan dan budaya lokal akibat kegiatan wisata.
- b. Membangun kesadaran dan penghargaan atas lingkungan dan memberikan keuntungan finansial di destinasi wisata, baik pada diri wisatawan, masyarakat lokal maupun pelaku wisata lainnya.
- c. Menawarkan pengalaman-pengalaman positif bagi wisatawan dalam pemeliharaan dan konservasi.
- d. Memberikan keuntungan finansial secara langsung bagi keperluan konservasi melalui kontribusi atau pengeluaran ekstra pariwisata.
- e. Memberikan keuntungan finansial dan pemberdayaan bagi masyarakat lokal dan menciptakan produk wisata yang mengedepankan nilai-nilai lokal.
- f. Meningkatkan kepekaan terhadap situasi sosial, lingkungan dan politik di daerah tujuan wisata.
- g. Menghormati hak asasi manusia dan perjanjian kerja, dalam arti memberikan kebebasan kepada wisatawan dan masyarakat lokal untuk menikmati atraksi wisata sebagai wujud hak asasi, serta tunduk pada aturan main yang adil dan disepakati bersama dalam pelaksanaan transaksi-transaksi wisata.

Ditjen Perlindungan dan Konservasi Alam (2000) menyatakan terdapat lima karakteristik dasar dalam usaha kegiatan ekowisata, yaitu:

- a. *Nature based*, yaitu ekowisata merupakan bagian atau keseluruhan dari alam itu sendiri meliputi unsur-unsur sumber dayanya, dimana kekayaan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya merupakan kekuatan utama dan memiliki nilai jual paling utama terhadap pengembangan ekowisata.
- b. *Ecologically sustainable*, yaitu ekowisata harus bersifat berkelanjutan ekologi, artinya semua fungsi lingkungan yang meliputi biologi, fisik, dan sosial tetap

berjalan dengan baik, dimana perubahan-perubahan dari pembangunan tidak mengganggu dan merusak fungsi-fungsi ekologis.

- c. *Environmentally educative*, yaitu melalui kegiatan-kegiatan yang positif terhadap lingkungan diharapkan mampu mempengaruhi perilaku masyarakat dan wisatawan untuk peduli terhadap konservasi sehingga dapat membantu kelestarian jangka panjang.
- d. Bermanfaat bagi masyarakat setempat, yaitu dengan melibatkannya masyarakat dalam kegiatan ekowisata diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung, seperti halnya masyarakat menyewakan peralatan-peralatan yang dibutuhkan wisatawan, menjual kebutuhan wisatawan, bertambahnya wawasan terhadap lingkungan dan sebagainya.
- e. Kepuasan wisatawan, yaitu kepuasan terhadap fenomena-fenomena alam yang didapatkan dari kegiatan ekowisata dapat meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap konservasi alam dan budaya setempat.

A Yoeti (1997) dalam penelitiannya menyatakan ekowisata terbagi menjadi dua jenis berdasarkan objek yang menjadi elemen utama perjalanan wisata, yaitu:

1. Ekowisata alam. Ciri-cirinya adalah dapat dilihat atau disaksikan secara bebas, seperti pemandangan alam, flora, fauna dan vegetasi hutan.
2. Ekowisata budaya. Hasil kebudayaan suatu bangsa yang dapat dilihat, disaksikan dan dipelajari, seperti monumen bersejarah, tempat-tempat budaya dan perayaan tradisional.

Dalam penelitian Page dan Ross (2002), berdasarkan tipe dan jumlah pengunjung serta sarana dan prasarana perjalanan, ekowisata dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. *Self Reliant Ecotourism*. Ekowisata yang melibatkan individu atau kelompok kecil ( $\pm$  10 orang) yang tidak atau menggunakan transportasi sangat sederhana (seperti berjalan kaki atau menggunakan perahu/sampan) untuk mengunjungi daerah yang relatif terpencil dan area yang masih alami.
- b. *Small Group Ecotourism*. Ekowisata yang melibatkan individu atau kelompok kecil ( $\pm$  15 orang) yang menggunakan transportasi sederhana (seperti kapal kecil atau boat kecil) untuk mengunjungi suatu daerah minat khusus yang relatif masih sulit di-jangkau. Tipe ini umumnya cocok untuk wisatawan semua umur dan tidak terlalu membutuhkan keahlian khusus untuk kegiatan di lapangan.
- c. *Popular Ecotourism*. Ekowisata yang melibatkan transportasi (seperti bus atau kapal boat besar) dan jumlah pengunjung yang banyak untuk mengunjungi daerah yang terkenal pada suatu negara atau lokasi dengan daya tarik wisata

yang populer dikalangan wisatawan. Tipe ini tidak membutuhkan kemampuan diri wisatawan yang tinggi karena tantangan di alam relatif lebih rendah. Namun tipe ini memungkinkan adanya kebutuhan sarana prasarana, infrastruktur dan pelayanan jasa, seperti pusat informasi pengunjung, penjual makanan dan minuman serta toilet. Tipe ini cocok untuk wisatawan segala usia.

- d. *Hard and Soft Ecotourism*. *Hard ecotourism* adalah tipe ekowisata yang ideal bagi wisatawan yang menyukai petualangan, sifatnya perorangan dan umumnya membutuhkan waktu yang lama bagi wisatawan untuk menikmati petualangan alam tersebut. Tipe ini cocok untuk wisatawan segala usia. Pesertanya adalah orang-orang dengan minat khusus dan mempunyai komitmen terhadap pelestarian lingkungan. *Soft ecotourism* adalah tipe ekowisata dengan melakukan perjalanan yang relatif singkat, interaksi dengan alam adalah salah satu dari beberapa komponen yang menjadi tujuan dalam pengalaman berwisata. Tipe ini bertempat di kawasan dengan sedikit berlatar alami, seperti di pusat taman interpretasi, melihat pemandangan di taman nasional yang telah difasilitasi dengan pelayanan dan jasa.

Page dan Ross (2002) juga mengemukakan bahwa ekowisata terdiri dari tiga prinsip utama, yaitu; prinsip konservasi, prinsip partisipasi masyarakat dan prinsip ekonomi. Adapun penjelasan prinsip-prinsip ekowisata adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Konservasi. Prinsip konservasi artinya memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan alam dan budaya, melaksanakan kaidah-kaidah usaha yang bertanggung jawab dan ekonomi berkelanjutan. Prinsip konservasi alam memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap pelestarian alam serta pembangunan yang mengikuti kaidah ekologis, sedangkan prinsip konservasi budaya adalah kepekaan dan penghormatan kepada nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan masyarakat setempat.
- b. Prinsip Partisipasi Masyarakat. Perencanaan dan pengembangan ekowisata harus melibatkan masyarakat setempat secara optimal.
- c. Prinsip Ekonomi. Pengembangan ekowisata dilaksanakan secara efisien, dimana dilakukan pengaturan sumberdaya alam sehingga pemanfaatannya yang berkelanjutan dapat mendukung generasi masa depan

BAB 4  
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**4.1. Strategi**

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai.

Penyusunan strategi didasarkan pada potensi Kampung Madong – Sei Nyirih yang ditinjau berdasarkan aspek destinasi, aspek industri, aspek pemasaran dan aspek kelembagaan & SDM. Dalam mengembangkan strategi, diperlukan analisis SWOT yang terdiri dari: kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threat*). Analisis SWOT Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Minawisata Kampung Madong – Sei Nyirih disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.** Analisis SWOT Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Minawisata Kampung Madong – Sei Nyirih

| FAKTOR INTERNAL   |  | FAKTOR EKSTERNAL  |   |
|---|--|---|---|
| Kekuatan ( <i>Strength</i> )  | Kelemahan ( <i>Weakness</i> )  | Peluang ( <i>Opportunity</i> )  | Ancaman ( <i>Threats</i> )  |
| 1. Lokasi merupakan kawasan yang memiliki ekosistem pesisir yang masih terjaga kelestariannya | 1. Budidaya masih mengandalkan supply benih dari Balai Benih Setokok Batam | 1. Restoran seafood merupakan wisata kuliner unggulan di Tanjungpinang, terdapat 73 restoran                                | 1. Rawan banjir ROB di kawasan permukiman                                     |
| 2. Ekosistem mangrove merupakan habitat gonggong, ketam bangkang dan udang                    | 2. Kapasitas produksi budidaya belum optimal                               | 2. Lokasi dekat dengan pusat perkantoran dan beberapa objek wisata unggulan (Bukit Manuk, Vihara Senggarang dan Kota Rebah) | 2. Kemungkinan resistensi pemilik lahan swasta/ masyarakat untuk dikembangkan |
| 3. Terdapat kolong bekas tambang pasir yang   | 3. Masih kurangnya sarana prasarana  | 3. Luas perairan budidaya laut  | 3. Persaingan bisnis disektor   |

| FAKTOR INTERNAL   |   | FAKTOR EKSTERNAL   |                               |
|---|---|--|-------------------------------|
| Kekuatan ( <i>Strength</i> )  | Kelemahan ( <i>Weakness</i> )   | Peluang ( <i>Opportunity</i> )   | Ancaman ( <i>Threats</i> )    |
| membentuk danau dengan air berwarna biru                                      | budidaya perikanan  | potensi 65,69 Ha   | pariwisata yang semakin ketat |
| 4. Terdapat 5 kelompok pembudidaya ikan dengan jumlah kerambah apung 162 unit | 4. Masih kurangnya sarana prasarana pengolahan perikanan                                  | 4. Dukungan dari Pemerintah Kota Tanjungpinang, Provinsi, Pusat dan pihak swasta                           |                               |
| 5. Terdapat 17 pelaku usaha pengolah produk perikanan                         | 5. Baru 11 dari 94 RTP yang mengikuti pelatihan budidaya perikanan                        | 5. Permintaan pasokan ikan dari luar negeri  |                               |
| 6. Terdapat 2 unit koperasi   | 6. Baru 1 orang dari 17 pelaku usaha yang mengikuti pelatihan pengolahan produk perikanan | 6. Berpotensi dikembangkan sebagai kampung tematik (Kemenpar-Ekraf) dan kampung ikan (KKP)                 |                               |
| 7. Merupakan kampung binaan fakultas perikanan UMRAH                          | 7. Sarana dan prasarana pendukung minawisata belum terbangun                              | 7. Kawasan mangrove berpotensi dijadikan sebagai kawasan rehabilitasi mangrove oleh Badan Restorasi Gambut |                               |
|   | 8. Belum ada unit pengelola objek wisata  |  |                               |
|   | 9. Belum ada media promosi dan pemasaran  |  |                               |
|   | 10. Belum tersedianya moda transportasi umum menuju lokasi                                |  |                               |

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan analisis SWOT yang disajikan dalam tabel di atas, strategi Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Minawisata Kampung Madong – Sei Nyirih, sebagai berikut:

a. Strategi *Strength Opportunity* (SO)

Strategi ini berupaya untuk memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk meraih peluang-peluang yang ada di luar atau lingkungan eksternal. Strategi yang dapat diterapkan antara lain:

- (1) Mengembangkan pengolahan hasil budidaya perikanan;
- (2) Memfasilitasi akses permodalan dan penyaluran bantuan;
- (3) Mengembangkan ekowisata dan eduwisata (laboratorium alam);
- (4) Membuat kebijakan pengembangan minawisata;
- (5) Memberdayakan masyarakat lokal dalam kegiatan edu-ekowisata;
- (6) Melakukan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk pengembangan minawisata.

b. Strategi *Strength Threats* (ST)

Strategi ini memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Strategi yang dapat diterapkan antara lain:

- (1) Membangun *Hatchery* Skala Rumah Tangga sebagai penunjang kegiatan Budidaya Air Laut;
- (2) Mengembangkan budidaya perikanan (ikan laut, gonggong, udang, ketambak dan teripang);
- (3) Meningkatkan kapasitas produksi budidaya perikanan;
- (4) Membangun sarana dan prasarana pendukung pengolahan perikanan;
- (5) Membangun sarana dan prasarana pendukung minawisata;
- (6) Meningkatkan kapasitas SDM budidaya, pengolahan perikanan dan pengelola pariwisata;
- (7) Menjalin kerjasama antara Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan BPBL Setokok Batam;
- (8) Meningkatkan strategi pemasaran hasil perikanan dan objek wisata melalui perluasan digital media;
- (9) Menyediakan aksesibilitas yang lancar menuju kawasan minawisata.

c. Strategi *Weakness Threats* (WO)

Dalam kuadran ini strategi yang dirancang adalah berusaha meminimalkan kelemahan dengan berusaha memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang dapat diterapkan antara lain:

- (1) Edukasi dan pendampingan masyarakat setempat tentang pelestarian dan pemanfaatan mangrove;
- (2) Melakukan sosialisasi, pendekatan persuasif, dan advokasi kepada pemilik lahan swasta dan masyarakat;
- (3) Menciptakan *brand image* objek pariwisata Kampung Madong-Sei Nyirih.

d. Strategi *Weakness Threats* (WT)

Strategi ini bertujuan untuk bertahan dengan meminimalisir kelemahan dengan menghindari ancaman. Strategi yang dapat diterapkan antara lain:

- (1) Membangun *seawall* (bangunan pengaman pantai);
- (2) Meningkatkan kerjasama antara masyarakat lokal, pelaku wisata dan pemerintah secara optimal;
- (3) Pembuatan rute laut Pelantar 1 – Kampung Madong – Sei Nyirih, PP setiap jam.

#### 4.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan dalam Rencana Aksi Pengembangan Minawisata Kampung Madong – Sei Nyirih, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi usaha dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan tingkat kemiskinan, melibatkan lembaga-lembaga terkait dibidang tertentu yang berdekatan secara geografis dan saling terkait karena kebersamaan dan komplementaritas.



**Gambar 6.** Tema/Fokus Pengembangan Kawasan Minawisata Kampung Madong – Sei Nyirih

Pengembangan kawasan minawisata Kampung Madong – Sei Nyirih direncanakan mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Tahun 2023

Pembangunan pada tahun 2023 diarahkan untuk pengembangan budidaya pesisir dan budidaya laut. Pengembangan budidaya pesisir meliputi budidaya gonggong, udang dan ketam bangkang. Pengembangan budidaya laut meliputi budidaya kakap, kerapu, ikan belanak, ikan lebam, ikan sembilang, ketam renjong, ikan cermin dan teripang.

2. Tahun 2024

Pembangunan pada tahun 2024 diarahkan untuk pengembangan pengolahan, pengemasan dan pemasaran produk hasil perikanan dengan tujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sehingga mampu menghasilkan diversifikasi olahan produk perikanan.

3. Tahun 2025

Pembangunan pada tahun 2025 diarahkan untuk pengembangan kampung tematik eduwisata dan ekowisata melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan sehingga dapat memperluas *multiplier effect* dalam penguatan ekonomi lokal.

4. Tahun 2026

Pembangunan pada tahun 2026 lebih diarahkan untuk mengembangkan Kampung Madong – Sei Nyirih sebagai minawisata yang mandiri dan berkelanjutan sehingga menjadi pusat percontohan dan rujukan pengembangan kampung ikan se-Provinsi Kepulauan Riau.

### 5.1. Identifikasi Pemangku Kepentingan

Sektor pariwisata dan perikanan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Pengembangan kawasan minawisata Kampung Madong – Sei Nyirih memerlukan keterlibatan banyak kelompok dalam meningkatkan kapasitas untuk merespons isu dan potensi yang ada. Sistem yang tepat untuk diterapkan dalam pengembangan kawasan ini adalah *collaborative governance* yang diharapkan dapat menunjukkan hasil sinergitas kinerja yang baik.

*Collaborative governance* merupakan cara pengelolaan sesuatu hal yang melibatkan semua pemangku kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung, berorientasi dan terjadi musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif dalam rangka mencapai tujuan bersama (Astuti, *et al.*, 2020). Kolaborasi pemangku kepentingan diharapkan dapat membentuk interaksi yang sinergis sehingga dapat mewujudkan sebuah kebijakan yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan publik.

Upaya untuk mengembangkan kawasan minawisata Kampung Madong – Sei Nyirih memerlukan kolaborasi berbagai pihak sebagai kunci pemikiran kreatif yang melahirkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi bersama untuk mencapai hasil terbaik. Dalam upaya pengembangan Kampung Madong - Sei Nyirih ini menggunakan konsep kolaborasi enam pihak atau dikenal dengan pendekatan hexa helix. Pada dasarnya konsep hexa helix merupakan inovasi pengembangan konsep triple helix, quadruple helix dan penta helix yang digunakan untuk memetakan kompleksitas pemangku kepentingan terhadap suatu permasalahan atau kebijakan tertentu. Identifikasi terhadap jajaran pemangku kepentingan dengan menggunakan konsep hexa helix ini melibatkan peran serta berbagai pihak yang terdiri dari 6 (enam) kelompok pemangku kepentingan baik dari pemerintahan maupun non pemerintahan, yaitu

1. *Kelompok pertama* adalah pemerintah (*Government*) meliputi: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau (DKP), Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau (Dispar Prov), Badan

Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang (Bappelitbang), Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang (DP3), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang (Dinas PUPR), Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Tanjungpinang (Dinas Perkim), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang (Disbudpar), Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang (DLH), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjungpinang (Disperindag), Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang (Disnakerkop & UM), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang (Dinkes), Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang (Disdik), Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kelurahan Kampung Bugis, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kepri (PDAM Tirta Kepri), Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL Batam);

2. *Kelompok kedua* adalah masyarakat, yang terdiri dari: Kelompok Pembudidaya, Kelompok Nelayan Tangkap, Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kelurahan Kampung Bugis, dan masyarakat Kampung Madong – Sei Nyirih.
3. *Kelompok ketiga* adalah akademisi yang berperan sebagai konseptor, meliputi: Universitas Raja Ali Haji (UMRAH), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Raja Haji Tanjungpinang, Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia (STTI) Tanjungpinang;
4. *Kelompok keempat* adalah swasta, meliputi: Bank Indonesia perwakilan Kepri, Bank Riau Kepri, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tanjungpinang, pelaku usaha rumah makan, pelaku usaha produk olahan perikanan;
5. *Kelompok kelima* adalah media, yang terdiri dari: RRI Tanjungpinang, Onine 93 FM, Tanjungpinang TV (TVTPI), Kepri TV, Radar Kepri, Harian Kepri, Antara Kepri, Tanjungpinang Post, TribunBatam;
6. *Kelompok keenam* adalah komunitas non-pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), meliputi: LSM Air Lingkungan dan Manusia (Alim), Yayasan *Ecology* Kepulauan Riau.

## **5.2. Pemetaan Pemangku Kepentingan**

Berdasarkan pengidentifikasian dan penjabaran pemangku kepentingan dalam Pengembangan Kawasan Minawisata Kampung Madong – Sei Nyirih, para pemangku kepentingan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori sesuai peran dan tugasnya masing-masing, yaitu pemangku kepentingan primer, pemangku kepentingan sekunder dan pemangku kepentingan kunci (Handayani

& Warsono, 2017). Tabel 5. berikut ini mengelompokkan pemangku kepentingan sesuai dengan ketiga kategori tersebut dan kepentingannya masing-masing.

**Tabel 5.** Pembagian Kategori Pemangku Kepentingan pada Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Minawisata Kampung Madong – Sei Nyirih

| No. | Kategori                            | Pemangku Kepentingan           | Peran  |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1.  | Pemangku Kepentingan Utama (Primer) | Pemerintah                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusun kebijakan/regulasi</li> <li>• Penyedia program</li> <li>• Sebagai koordinator dan pelaksana teknis program/kegiatan</li> <li>• Fasilitator pelayanan publik</li> </ul>   |
|     |                                     | Masyarakat                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksana kegiatan</li> <li>• Penerima manfaat</li> </ul>   |
|     |                                     | Akademisi                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengetahui secara teoritis terkait konsep pengembangan minawisata</li> <li>• Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>• Memberikan bantuan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat</li> </ul> |
| 2.  | Pemangku Kepentingan Sekunder       | Swasta                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyedia program bantuan langsung melalui CSR</li> <li>• Sebagai pelaku usaha dalam pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta industri pariwisata</li> </ul>   |
|     |                                     | Media                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berperan dalam penyebarluasan informasi dan promosi</li> </ul>  |
|     |                                     | Komunitas non-pemerintah (LSM) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan advokasi kepada masyarakat</li> <li>• Memfasilitasi pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat tentang pelestarian lingkungan</li> </ul>   |
| 3.  | Pemangku Kepentingan Kunci          | Pemerintah Kota Tanjungpinang  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merumuskan dan menentukan kebijakan serta program kerja terkait pengembangan Kampung Madong –</li> </ul>  |

| No. | Kategori | Pemangku Kepentingan | Peran  |
|-----|----------|----------------------|--|
|     |          | UMRAH                | <p>Sei Nyirih</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinator perencanaan program/kegiatan dan pembangunan</li> <li>• Mewadahi kepentingan dan aspirasi masyarakat</li> <li>• Pembinaan dan pengendalian teknis terkait pengembangan kawasan minawisata Kampung Madong – Sei Nyirih</li> <li>• Berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang merumuskan program pengembangan kawasan minawisata Kampung Madong – Sei Nyirih</li> <li>• Memberikan hasil riset dan inovasi yang merupakan rekomendasi kebijakan daerah dan berguna bagi pengembangan Kampung Madong – Sei Nyirih</li> <li>• Pembinaan langsung kepada masyarakat Kampung Madong – Sei Nyirih</li> </ul> |

*Sumber: Hasil Analisis, 2022*

Peran dan fungsi para pemangku kepentingan dalam Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Minawisata Kampung Madong – Sei Nyirih dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Pemerintah

Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan pemangku kepentingan yang memiliki peran terbesar dalam pengembangan kawasan minawisata Kampung Madong – Sei Nyirih. Pemerintah menjadi pemain utama karena didukung oleh kemampuan pendanaan, regulasi, sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai untuk terlibat dalam kegiatan pengembangan minawisata. Pemerintah berperan sebagai **regulator** sekaligus **kontroler** yang memiliki peraturan dan tanggungjawab dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian program/kebijakan sekaligus

memfasilitasi pelayanan publik. Pemerintah juga memiliki peran sebagai **koordinator** bagi para pemangku kepentingan yang berkontribusi pada pembangunan/pengembangan yang ingin dicapai.

## 2. Masyarakat

Pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh sangat kuat terhadap Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Minawisata Kampung Maodng - Sei Nyirih selain pemerintah adalah masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan tersebut. Masyarakat Kampung Madong - Sei Nyirih berperan sebagai **akselerator** dalam pelaksanaan kegiatan sekaligus **penerima manfaat** dari rencana aksi. Terdapat beberapa kelompok masyarakat yang akan berperan langsung dalam pelaksanaan kegiatan rencana aksi, yaitu Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap, Kelompok Nelayan Perikanan Budidaya, Kelompok Usaha Bersama, Koperasi Perikanan Usaha Bersama dan Koperasi Perikanan Budi Mulya, dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kelurahan Kampung Bugis.

## 3. Akademisi

Perguruan Tinggi atau akademisi dapat berperan sebagai **konseptor** dalam proses pengembangan, misalnya melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya melakukan riset untuk menghasilkan rekayasa teknis maupun kelembagaan yang dapat mendukung pengembangan Kampung Madong - Sei Nyirih. Disamping itu, Perguruan Tinggi/Akademisi juga dapat membantu dalam meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan, berupa pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat pesisir dan nelayan secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia. Dalam hal ini, Perguruan Tinggi/Akademisi merupakan sumber pengetahuan dari pengembangan kawasan minawisata Kampung Madong - Sei Nyirih yang mencakup konsep-konsep, teori-teori dan model pengembangan terbaru serta relevan dengan kondisi potensi daya tarik dan peluang pengembangan sumber daya yang ada di Madong - Sei Nyirih.

## 4. Swasta

Dunia usaha atau juga dapat disebut sebagai sektor swasta dalam proses pengembangan kawasan minawisata Kampung Madong - Sei Nyirih ini dapat berperan sebagai **inkubator** dalam menghadirkan infrastruktur teknologi, modal dan berbagai fungsi lainnya yang berkaitan dengan proses pengembangan. Sektor swasta dengan keunggulannya terkait penyediaan modal secara cepat, serta memiliki tenaga kerja yang profesional dan mengikuti perkembangan jaman, menjadikan sektor swasta dapat berkontribusi dalam memenuhi kekurangan dari sektor pemerintah (Cahyo dan Nuryanti, 2018). Sektor swasta atau dunia usaha

memberikan perhatian sebagai bentuk kewajiban sosial melalui dukungan pendanaan sebagai perwujudan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *charity* dari pengusaha. CSR dapat diberikan dalam bentuk bantuan sarana dan prasarana perikanan dan pariwisata kepada masyarakat. Dunia usaha bekerja sama dengan pemerintah dalam penyaluran bantuan, meskipun kadangkala mendistribusikan langsung kepada masyarakat.

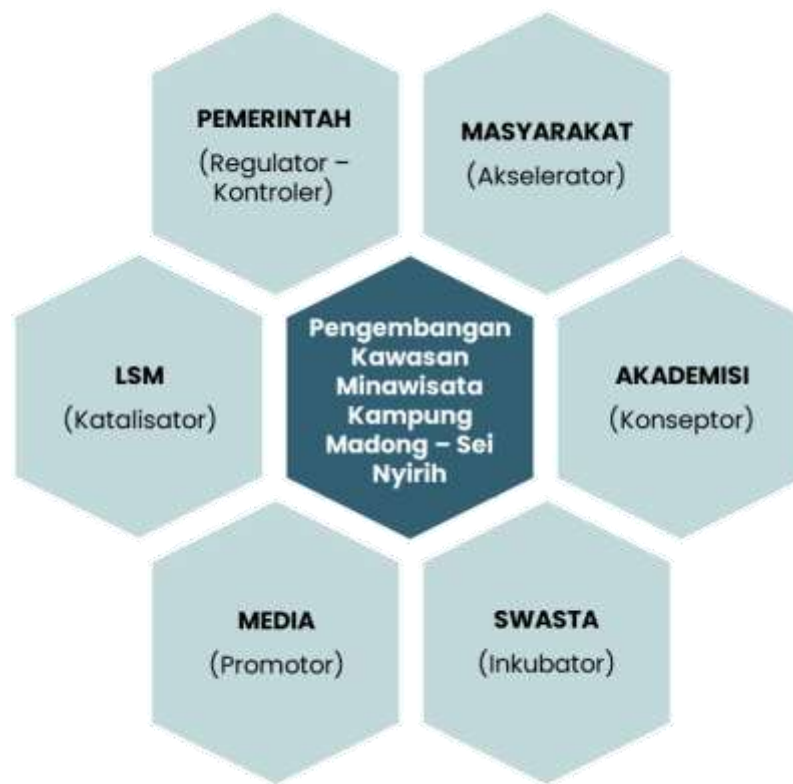
#### 5. Media

Media dalam konteks pengembangan kawasan minawisata Kampung Madong – Sei Nyirih menjadi penting karena perannya sebagai **promotor**. Media massa memiliki peran dalam penyebarluasan informasi, baik dalam bentuk media cetak, elektronik maupun media internet. Media internet, khususnya media sosial sangat berperan dalam memberikan informasi dengan cepat dan akurat kepada pemangku kepentingan dan masyarakat. Pemanfaatan media massa merupakan wahana paling efektif dan efisien dalam mempublikasikan Kampung Madong sebagai salah satu destinasi wisata di Kota Tanjungpinang, serta mendukung promosi dan pemasaran produk dan layanan yang dihasilkan oleh masyarakat.

#### 6. Komunitas non-pemerintah (LSM)

Komunitas non-pemerintah (LSM) dapat berperan sebagai **katalisator**. Dalam hal ini, komunitas merupakan orang-orang yang memiliki minat yang sama dan relevan dengan pengembangan yang akan diwujudkan. Komunitas/LSM yang terlibat dalam Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Minawisata Kampung Madong – Sei Nyirih teridentifikasi dari LSM Air, Lingkungan dan Manusia, serta Yayasan Ekologi dan organisasi lainnya yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan daerah. Komunitas/LSM ini bertindak sebagai perantara atau menjadi penghubung antar pemangku kepentingan untuk membantu masyarakat dalam memperlancar keseluruhan proses perubahan sosial yang akan terjadi, misalnya dengan memberikan advokasi kepada masyarakat, serta memfasilitasi pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat tentang pelestarian lingkungan.

Berdasarkan hasil analisis peran tersebut, konfigurasi atas peran dari masing-masing aktor dalam Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Minawisata Kampung Madong – Sei Nyirih dapat digambarkan seperti pada **Gambar 7.** berikut ini.



**Gambar 7.** Konfigurasi Peran Hexa Helix pada Pengembangan Kawasan Minawisata Kampung Madong – Sei Nyirih

### 5.3. Rencana Aksi

Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Minawisata Kampung Madong – Sei Nyirih dilakukan dengan analisis klaster yang bertujuan untuk melakukan pengelompokan rencana aksi berdasarkan konsep minawisata itu sendiri yang terdiri dari pemanfaatan kawasan wisata dengan pengembangan produksi perikanan baik tangkap maupun budidaya, serta dengan mempertimbangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh Madong dan Sei Nyirih. Adapun konsep minawisata yang akan dikembangkan pada Kampung Madong – Sei Nyirih adalah minawisata perikanan tangkap, budidaya pesisir dan laut, pengolahan hasil perikanan, dan eco-edu wisata. Dari pengelompokan konsep pengembangan tersebut, maka terdapat 4 klaster utama yang menjadi landasan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Minawisata Kampung Madong – Sei Nyirih, yaitu Klaster Perikanan Tangkap, Klaster Perikanan Budidaya, Klaster Pengolahan Hasil Perikanan dan Klaster Wisata. Berikut pembagian klaster dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, sebagaimana tertuang pada Tabel 6.

**Tabel 6.** Matriks Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Minawisata Kampung Madong – Sei Nyirih

| Arah Kebijakan                                  | Klaster                   | Rencana Aksi   | Output   | Tahun |      |      |            | Pemangku Kepentingan       |
|---|---------------------------|--|--|-------|------|------|------------|----------------------------|
|   |                           |  |  | 2023  | 2024 | 2025 | 2026       |                            |
| Pengembangan Budidaya Pesisir dan Budidaya Laut | <b>Perikanan Budidaya</b> | Membentuk kelompok pembudi-<br>daya  | 2 (dua)<br>kelompok<br>pembudi-<br>daya  |       |      |      |            | DP3;<br>Masyarakat         |
|   |                           | Melaksana-<br>kan<br>kerjasama<br>antara<br>Pemerintah<br>Kota Tanjung<br>pinang<br>dengan BPBL<br>Batam | MoU tentang<br>jaminan<br>ketersediaan<br>benih dan<br>pendampingan<br>pengembangan<br><i>Hatchery</i> Skala<br>Rumah Tangga |       |      |      |            | Kepala<br>Daerah; DP3      |
|   |                           | Melaksana-<br>kan<br>pelatihan<br>budidaya<br>perikanan<br>(pesisir dan<br>laut)                         | 1. Pelatihan<br>peningkatan<br>produksi dan<br>mutu<br>budidaya<br>perikanan   |       |      |      |            | KKP; DKP;<br>DP3;<br>UMRAH |
|   |                           |  | 2. Pelatihan<br>manaje-<br>men<br>usaha<br>budidaya<br>perikanan   |       |      |      |            |                            |
|   |                           | Memperkuat<br>kelembaga-<br>an kelompok<br>pembudi-<br>daya  | 1. Pelatihan<br>manaje-<br>men<br>organisasi<br>KUB dan  |       |      |      | Masyarakat |                            |

| Arah Kebijakan | Klaster | Rencana Aksi   | Output  | Tahun |      |      |      | Pemangku Kepentingan |
|----------------|---------|--|---|-------|------|------|------|----------------------|
|                |         |  |   | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 |                      |
|                |         | daya dan koperasi (aspek organisasi, aspek sumber daya manusia, aspek pelayanan dan aspek kemitraan) | Koperasi Perikanan  |       |      |      |      |                      |
|                |         |  | 2. Pelatihan manajemen SDM KUB dan Koperasi Perikanan                           |       |      |      |      | DP3                  |
|                |         |  | 3. Fasilitasi badan hukum KUB dan Koperasi Perikanan                            |       |      |      |      | Disnakerkop & UM     |
|                |         |  | 4. <i>Benchmarking</i> terkait pelayanan dan kemitraan                          |       |      |      |      | Bappelitbang         |
|                |         | Melaksanakan pendampingan program  | Penguatan Forum Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah (PELD) Kota Tanjungpinang |       |      |      |      | Bappelitbang         |
|                |         | Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pengemba-                           |   |       |      |      |      | Bappelitbang         |

| Arah Kebijakan   | Klaster                  | Rencana Aksi   | Output   | Tahun |      |      |      | Pemangku Kepentingan                         |
|--|--------------------------|--|--|-------|------|------|------|--|
|  |                          |  |  | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 |  |
|  |                          | ngan dan evaluasi rencana aksi   |  |       |      |      |      |  |
|  |                          | Mendorong pengembangan komoditas unggulan daerah yang memiliki nilai ekonomis tinggi | Pengembangan budidaya ikan kakap, gonggong, rumput laut, dan lain-lain |       |      |      |      | BRIN; Bappelitbang ; DP3; UMRAH; BPBL Batam; |
| Pengembangan Pengolahan, Pengemasan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan | <b>Perikanan Tangkap</b> | Menyediakan sarana dan prasarana perikanan tangkap                                   | 1. Alat tangkap ramah lingkungan                                       |       |      |      |      | KKP; DP3                                     |
|  |                          |  | 2. Kapal penangkap ikan dan angkut                                     |       |      |      |      | KKP; DP3                                     |
|  |                          | Melaksanakan pembinaan terhadap nelayan  | Pelatihan bimbingan teknis kepada nelayan                              |       |      |      |      | KKP; DP3                                     |
|  |                          | Memperkuat kelembagaan kelompok nelayan tangkap                                      | 1. Pelatihan manajemen organisasi KUB nelayan tangkap                  |       |      |      |      | KKP; DP3                                     |

| Arah Kebijakan                                    | Klaster                           | Rencana Aksi                                 | Output   | Tahun |      |      |                        | Pemangku Kepentingan          |
|---|-----------------------------------|--|--|-------|------|------|------------------------|-------------------------------|
|   |                                   |  |  | 2023  | 2024 | 2025 | 2026                   |                               |
|   |                                   |  | 2. Pelatihan manajemen SDM KUB nelayan tangkap |       |      |      |                        | KKP; DP3                      |
|   |                                   |  | 3. Fasilitasi badan hukum KUB nelayan tangkap  |       |      |      |                        | KKP; DP3                      |
|   | <b>Pengolahan Hasil Perikanan</b> | Membangun <i>Hatchery</i> Skala Rumah Tangga | 4. Pembangunan HSRT                            |       |      |      |                        | BPBL Batam; DP3; Swasta (CSR) |
| 5. Pelatihan HSRT                                 |                                   |  |  |       |      |      | BPBL Batam; DP3; UMRAH |                               |
| 6. Pendampingan HSRT hingga mandiri               |                                   |  |  |       |      |      | BPBL Batam; DP3; UMRAH |                               |
| 7. HSRT sebagai pusat edukasi pembibitan ikan     |                                   |  |  |       |      |      | DP3; UMRAH             |                               |
| 1. Penelitian bahan baku lokal pakan ikan mandiri |                                   |  |  |       |      |      | UMRAH                  |                               |

| Arah Kebijakan | Klaster | Rencana Aksi                                      | Output  | Tahun |      |      |      | Pemangku Kepentingan                             |
|----------------|---------|---|---|-------|------|------|------|--|
|                |         |   |   | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 |  |
|                |         |   | 2. Pelatihan pembuatan pakan ikan mandiri dengan pemanfaatan bahan baku lokal                       |       |      |      |      | UMRAH  |
|                |         |   | 3. Bantuan sarana prasarana mesin pakan ikan skala rumah tangga (Target pasar : Kota Tanjungpinang) |       |      |      |      | KKP; DKP; DP3; Swasta (CSR)                      |
|                |         |   | 4. Pembangunan pabrik pakan ikan  |       |      |      |      | KUB dan Koperasi                                 |
|                |         | Menyediakan sarana prasarana keramba jaring apung | 400 unit keramba jaring apung   |       |      |      |      | KKP; DKP   |
|                |         | Menyediakan sarana prasarana budidaya pesisir     | 1. Penanaman dan pelestarian mangrove   |       |      |      |      | KKP; Badan Restorasi Gambut dan Mangrove; BPDAS; |

| Arah Kebijakan | Klaster | Rencana Aksi                                    | Output  | Tahun |      |      |      | Pemangku Kepentingan                                     |
|----------------|---------|---|---|-------|------|------|------|--|
|                |         |   |   | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 |  |
|                |         |   |   |       |      |      |      | DLH;<br>LSM;   |
|                |         |   | 2.9 Ha lokasi budidaya kepiting bakau               |       |      |      |      | DKP; DP3   |
|                |         |   | 3.6 Ha lokasi budidaya gonggong                     |       |      |      |      |  |
|                |         |   | 4.9 Ha lokasi budidaya udang                        |       |      |      |      |  |
|                |         |   | 5.6 Ha lokasi budidaya teripang                     |       |      |      |      |  |
|                |         | Melakukan diversifikasi olahan produk perikanan | 1. Penelitian diversifikasi olahan produk perikanan |       |      |      |      | UMRAH  |
|                |         |   | 2. Pelatihan diversifikasi olahan produk perikanan  |       |      |      |      | DP3;<br>Disdagin;<br>Disbudpar;<br>Swasta;<br>Masyarakat |
|                |         |   | 3. Diversifikasi olahan produk perikanan            |       |      |      |      | Pelaku Usaha;<br>KUB                                     |

| Arah Kebijakan | Klaster | Rencana Aksi   | Output  | Tahun |      |      |      | Pemangku Kepentingan             |
|----------------|---------|--|---|-------|------|------|------|----------------------------------|
|                |         |  |   | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 |                                  |
|                |         |  | 4. Pelatihan peningkatan produksi dan mutu pengolahan hasil perikanan     |       |      |      |      | UMRAH                            |
|                |         |  | 5. Pelatihan manajemen usaha pengolahan hasil perikanan                   |       |      |      |      | UMRAH                            |
|                |         | Mengimplem-<br>entasikan<br>sistem<br>jaminan<br>mutu dan<br>keamanan<br>hasil<br>perikanan<br>HACCP<br>( <i>Hazard<br/>Analysis and<br/>Critical<br/>Control<br/>Points</i> ) | 1. Bimbingan teknis HACCP kepada pelaku usaha pengolahan produk perikanan |       |      |      |      | DP3;<br>UMRAH                    |
|                |         |  | 2. Fasilitasi P-IRT, B-POM dan sertifikat halal                           |       |      |      |      | Disdagin<br>Prov;<br>Disdagin;   |
|                |         | Melaksana-<br>kan<br>pembinaan<br>terkait  | 1. Pelatihan usaha mikro  |       |      |      |      | Disdagin;<br>Disnakerkop<br>& UM |
|                |         |  | 2. Pelatihan  |       |      |      |      |                                  |

| Arah Kebijakan              | Klaster       | Rencana Aksi  | Output   | Tahun |      |      |      | Pemangku Kepentingan      |
|-----------------------------|---------------|---|--|-------|------|------|------|---------------------------|
|                             |               |   |  | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 |                           |
|                             |               | pemasaran hasil perikanan   | pemasaran industri kecil menengah                                    |       |      |      |      |                           |
|                             |               | Membangun fasilitas pendukung pengembangan pengolahan hasil perikanan | Tersedianya rumah produksi sentra IKM di Kampung Madong - Sei Nyirih |       |      |      |      | Kemenperin; Disdagin      |
| Pengembangan Edu-Eko Wisata | <b>Wisata</b> | Membangun sarana dan prasarana pendukung edu-eko wisata               | 1. Jalan lingkungan  |       |      |      |      | KemenPUPR; Dinas Perkim   |
|                             |               |   | 2. Jalan menuju objek wisata Danau Biru                              |       |      |      |      | KemenPUPR; Dinas PUPR     |
|                             |               |   | 3. Pembangunan pelantar wisata mangrove Sei Jedun – Danau Biru       |       |      |      |      | Kemenpar ekraf; Disbudpar |
|                             |               |   | 4. Drainase  |       |      |      |      | KemenPUPR; Dinas PUPR     |
|                             |               |   | 5. Tersedia-nya air bersih   |       |      |      |      | Dinas PUPR; PDAM          |
|                             |               |   | 6. Tersedia-nya listrik  |       |      |      |      | PLN                       |

| Arah Kebijakan | Klaster | Rencana Aksi | Output   | Tahun |      |      |      | Pemangku Kepentingan                                |
|----------------|---------|--------------|--|-------|------|------|------|---|
|                |         |              |  | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 |   |
|                |         |              | 7. TPS 3R<br>(Tempat Pemrosesan Sampah <i>Reduce, Reuse, Recycle</i> ) |       |      |      |      | DLH   |
|                |         |              | 8. IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Komunal                      |       |      |      |      | KemenPUPR;<br>Dinas PUPR                            |
|                |         |              | 9. Pengada-an pompong wisata   |       |      |      |      | Dishub;<br>Disbudpar                                |
|                |         |              | 10. Sarana transportasi laut   |       |      |      |      | Dishub;   |
|                |         |              | 11. Pembangunan <i>homestay</i>  |       |      |      |      | Dispar Prov;<br>Disbudpar;<br>Swasta;<br>Masyarakat |
|                |         |              | 12. Jembatan penyebrangan Kampung Madong-Sei Nyirih                    |       |      |      |      | KemenPUPR;<br>Dinas PUPR                            |
|                |         |              | 13. Pembangunan Fasilitas Kesehatan                                    |       |      |      |      | Kemenkes;<br>Dinkes;<br>Dinas PUPR                  |

| Arah Kebijakan | Klaster | Rencana Aksi                          | Output   | Tahun |      |      |      | Pemangku Kepentingan                      |
|----------------|---------|---------------------------------------|--|-------|------|------|------|---|
|                |         |                                       |  | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 |   |
|                |         |                                       | 14. Pembangunan pusat penjualan souvenir                   |       |      |      |      | Kemenperin; Disdagin                      |
|                |         | Mengembangkan paket wisata            | 1. Paket Wisata <i>Tour Mangrove</i> – Danau Biru          |       |      |      |      | Disbudpar; DP3; UMRAH; Swasta; Masyarakat |
|                |         |                                       | 2. Paket Wisata Edukasi Budaya Perikanan                   |       |      |      |      |   |
|                |         |                                       | 3. Paket Wisata Edukasi Pengolahan Hasil Perikanan         |       |      |      |      |   |
|                |         |                                       | 4. Paket Wisata <i>Staycation</i> – Kuliner <i>Seafood</i> |       |      |      |      |   |
|                |         |                                       | 5. Paket Wisata Laboratorium Alam                          |       |      |      |      |   |
|                |         | Melaksanakan pelatihan pemandu wisata | Pelatihan <i>tour guide</i>                                |       |      |      |      | Disbudpar;                                |
|                |         | Melaksana-                            | Pelatihan tata   |       |      |      |      | Disbudpar;                                |

| Arah Kebijakan | Klaster | Rencana Aksi  | Output   | Tahun |      |      |      | Pemangku Kepentingan                               |
|----------------|---------|---|--|-------|------|------|------|--|
|                |         |   |  | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 |  |
|                |         | kan pelatihan tata kelola, bisnis dan pemasaran daya tarik wisata   | kelola, bisnis dan pemasaran objek wisata                              |       |      |      |      |  |
|                |         | Mengembangkan Kampung Madong-Sei Nyirih menjadi Kampung Tematik   | 1. Penetapan Kampung Tematik   |       |      |      |      | Disbudpar; DP3; DLH                                |
|                |         |   | 2. Pembangunan Kampung Tematik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik |       |      |      |      | Kemenpar ekraf; KKP; KemenLHK; Disbudpar; DP3; DLH |
|                |         | Mempublikasikan Kampung Madong - Sei Nyirih sebagai salah satu objek wisata di Kota Tanjungpinang melalui perluasan digital media untuk promosi | Publikasi Kampung Madong – Sei Nyirih                                  |       |      |      |      | Diskominfo; Disbudpar; Media                       |

| Arah Kebijakan | Klaster | Rencana Aksi                          | Output  | Tahun |      |      |      | Pemangku Kepentingan         |
|----------------|---------|---------------------------------------|---|-------|------|------|------|------------------------------|
|                |         |                                       |   | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 |                              |
|                |         | Mempromosikan produk olahan perikanan | Publikasi produk olahan perikanan Kampung Madong – Sei Nyirih   |       |      |      |      | Diskominfo; Disbudpar; Media |
|                |         | Mengelola sampah pesisir              | Pembersihan sampah plastik di Laut melalui gerakan partisipasi nelayan dan masyarakat                       |       |      |      |      | KKP; DP3; DLH; Masyarakat    |
|                |         |                                       | Pengembangan Program Desa Pesisir Bersih dengan memberdayakan KUB atau Kelompok Pengelola Sampah            |       |      |      |      | KKP; DP3; DLH                |
|                |         |                                       | Penyediaan sarana dan prasarana pendukung, seperti mesin pres sampah kering, motor roda 3 pengangkut sampah |       |      |      |      | KKP; DP3; DLH; Swasta (CSR)  |

| Arah Kebijakan   | Klaster | Rencana Aksi   | Output  | Tahun |      |      |      | Pemangku Kepentingan              |
|--|---------|--|---|-------|------|------|------|-----------------------------------|
|  |         |  |   | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 |                                   |
|  |         |  | Pendamping-an kelompok dan pembinaan kapasitas kewirausaha-an kepada kelompok KUB dan masyarakat sekitar tentang nilai ekonomi dari sampah plastik dan sampah anorganik lainnya |       |      |      |      | DP3; DLH; UMRAH; LSM Alim; Swasta |
| Pengembangan Minawisata yang Mandiri dan Berkelanjutan |         | Mengembangkan Minawisata Kampung Madong-Sei Nyirih, sehingga menjadi pusat percontohan dan rujukan pengembangan kampung ikan se-Provinsi Kepri | 1. Kurikulum MERDEKA (mahasiswa KKN dan magang)   |       |      |      |      | Akademisi                         |
|  |         |  | 2. Kurikulum muatan lokal belajar dari alam bagi siswa SD dan SMP   |       |      |      |      | Disdik; DP3; Disbudpar; UMRAH     |

Sumber: Hasil Analisis, 2022

## BAB 6

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

Rencana aksi pengembangan kawasan minawisata Kampung Madong – Sei Nyirih disusun sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan atau kegiatan sehingga dapat mewujudkan Kampung Madong – Sei Nyirih sebagai kawasan minawisata yang mandiri dan berkelanjutan serta meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Kawasan Kampung Madong – Sei Nyirih merupakan satu kesatuan ekosistem pesisir yang disatukan oleh badan air Sei Nyirih. Kawasan ini berpotensi lengkap mulai dari lingkungan alam yang bersih dan kaya dengan keanekaragaman hayati, Danau Biru yang dapat dikembangkan sebagai objek wisata baru serta didukung oleh masyarakat yang mayoritas partisipatif. Untuk mengembangkan Kampung Madong – Sei Nyirih menjadi kawasan minawisata diperlukan dukungan pembangunan infrastruktur yang memadai, dan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan.

#### 6.2. Rekomendasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Sumber Pendanaan

**Tabel 7.** Rekomendasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Sumber Pendanaan

| No   | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator | Sumber Pendanaan   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                              |
|------|---|-----------|--|--|
| 1.   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>  |           | <b>APBN/APBD PROVINSI/ APBD KOTA/Dana lain yang sah dan tidak mengikat</b> | <b>Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang</b> |
| 1.1. | <b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b> |           |  |  |

| No   | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator   | Sumber Pendanaan                                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                |
|------|---|---|--|--|
| 1.1. | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap                                  | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia  |  |  |
| 1.1. | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                        | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia                                      |  |  |
| 1.2. | <b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                 |   |  |  |
| 1.2. | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil  | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya   |  |  |
| 1.2. | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya           |  |  |
| 1.2. | Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha |  |  |
| 2.   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>                                 |   | <b>APBN/APBD PROVINSI/ APBD KOTA/ Dana lain yang</b> | <b>Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota</b> |
| 2.1. | <b>Penerbitan Tanda Daftar bagi</b>   |   | <b>sah dan tidak mengikat</b>                        | <b>Tanjungpinang</b>                             |

| No    | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator   | Sumber Pendanaan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------|--|---|------------------|-----------------------------------|
|       | <b>Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>  |   |                  |                                   |
| 2.1.  | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan |                  |                                   |
| 2.2.  | <b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>  |   |                  |                                   |
| 2.2.  | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil   | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas   |                  |                                   |
| 2.2.2 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil  | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan   |                  |                                   |
| 2.2.3 | Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan  | Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan   |                  |                                   |

| No    | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator   | Sumber Pendanaan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------|---|---|------------------|-----------------------------------|
|       | Pembiayaan, Kemitraan Usaha   | Pembiayaan, Kemitraan Usahanya  |                  |                                   |
| 2.2.4 | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan |                  |                                   |
| 2.3.  | <b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>   |   |                  |                                   |
| 2.3.1 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota   | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota   |                  |                                   |
| 2.3.2 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota   | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota  |                  |                                   |
| 2.3.3 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah  | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota   |                  |                                   |

| No        | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator   | Sumber Pendanaan  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                              |
|-----------|--|---|---|--|
|           | Kabupaten/Kota   | yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan  |   |  |
| 2.3.4     | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat   | Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat   |   |  |
| <b>3.</b> | <b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>  |   | <b>APBN/APBD PROVINSI/APBD KOTA/Dana lain yang sah dan tidak mengikat</b> | <b>Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang</b> |
| 3.1.      | <b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>           |   |   |  |
| 3.1.      | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko |   |  |

| No   | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator   | Sumber Pendanaan  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                 |
|------|---|---|---|---|
| 3.2. | <b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>  |   |   |   |
| 3.2. | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi |   |   |
| 4.   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>                                     |   | <b>APBN/APBD PROVINSI/APBD KOTA/Dana lain yang sah dan tidak mengikat</b> | <b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang</b> |
| 4.1. | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten /Kota</b>            |   |   |   |
| 4.1. | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM   | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun  |   |   |

| No        | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator  | Sumber Pendanaan   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |
|-----------|---|--|--|---|
| 4.1.2     | Supervisi Pembangunan /Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM                                | Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM                      |  |   |
| 4.1.3     | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan                                    | Kapasitas SPAM IKK /Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun                              |  |   |
| 4.1.4     | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan  | Jumlah unit SPAM IKK /Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan |  |   |
| <b>5.</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>                               |  | <b>APBN/APBD PROVINSI/ APBD KOTA/Dana lain yang sah dan tidak mengikat</b> | <b>Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Tanjungpinang</b> |
| 5.1.      | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten /Kota</b> |  |  |   |
| 5.1.      | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik   | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten /Kota yang Disusun       |  |   |

| No    | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator  | Sumber Pendanaan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------|--|--|------------------|-----------------------------------|
|       | dalam Daerah Kabupaten/Kota  |  |                  |                                   |
| 5.1.2 | Supervisi Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman | Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman |                  |                                   |
| 5.1.3 | Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman  | Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman   |                  |                                   |
| 5.1.4 | Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik                          | Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik |                  |                                   |
| 5.1.5 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik  | Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara   |                  |                                   |

| No    | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator  | Sumber Pendanaan  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                 |
|-------|---|--|---|---|
| 6.    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>   |  | <b>APBN/APBD PROVINSI/APBD KOTA/Dana lain yang sah dan tidak mengikat</b> | <b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang</b> |
| 6.1.  | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> |  |   |   |
| 6.1.1 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan  | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun        |   |   |
| 6.1.2 | Supervisi Pembangunan /Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan  | Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Penin gkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan |   |   |
| 6.1.3 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan   | Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun   |   |   |
| 6.1.4 | Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan   | Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi                               |   |   |

| No     | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator   | Sumber Pendanaan                                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab        |
|--------|---|---|---|--|
| 7.     | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>  |   | <b>APBN/APBD PROVINSI/APBD</b>                    | <b>Dinas Pekerjaan Umum dan</b>          |
| 7.1.   | <b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota</b>  |   | <b>KOTA/Dana lain yang sah dan tidak mengikat</b> | <b>Penataan Ruang Kota Tanjungpinang</b> |
| 7.1.1. | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian |   |  |
| 7.1.2. | Pembebasan Lahan /Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan   | Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan  |   |  |
| 7.1.3. | Pembangunan Jalan   | Panjang Jalan yang Dibangun   |   |  |
| 7.1.4. | Rehabilitasi Jalan  | Panjang Jalan yang Direhabilitasi   |   |  |
| 7.1.5. | Pemeliharaan Berkala Jalan  | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala  |   |  |
| 7.1.6. | Pemeliharaan Rutin Jalan  | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin  |   |  |
| 7.1.7. | Pembangunan   | Panjang Jembatan  |   |  |

| No        | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator  | Sumber Pendanaan                                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab           |
|-----------|--|--|---|---|
|           | Jembatan   | yang Dibangun  |   |   |
| 7.1.8     | Rehabilitasi Jembatan  | Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi                                 |   |   |
| 7.1.9     | Pemeliharaan Rutin Jembatan  | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin                    |   |   |
| 7.1.      | Pemeliharaan Berkala Jembatan  | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala                  |   |   |
| 7.1.      | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan   | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan |   |   |
| 7.1.      | Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan   | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan              |   |   |
| <b>8.</b> | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>   |  | <b>APBN/APBD PROVINSI/ APBD</b>                   | <b>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota</b> |
| 8.1.      | <b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten /Kota</b> |  | <b>KOTA/Dana lain yang sah dan tidak mengikat</b> | <b>Kota Tanjungpinang</b>                   |
| 8.1.      | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan   | Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang                  |   |   |

| No          | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator  | Sumber Pendanaan  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------|---|--|---|-----------------------------------|
|             | Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten /Kota  | Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota            |   |                                   |
| <b>9.</b>   | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                  |  | <b>APBN/APBD PROVINSI/APBD KOTA/Dana lain yang sah dan tidak mengikat</b> |                                   |
| <b>9.1.</b> | <b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota</b> |  |   |                                   |
| 9.1.        | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya   | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun               |   |                                   |
| 9.1.        | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan  | Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan |   |                                   |
| 9.1.        | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                     | Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan |   |                                   |
| 9.1.        | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat   | Jumlah Alat Kesehatan/ Alat                                    |   |                                   |

| No         | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator  | Sumber Pendanaan  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------------|--|--|---|-----------------------------------|
|            | Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan  | Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan  |   |                                   |
| 9.1.       | Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan  | Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan                                |   |                                   |
| 9.1.       | Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan                               | Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan                             |   |                                   |
| 9.1.       | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar |   |                                   |
| <b>10.</b> | <b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>                                       |  | <b>APBN/APBD PROVINSI/APBD KOTA/Dana lain yang sah dan tidak mengikat</b> |                                   |
| 10.1.      | <b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>  |  |   |                                   |
| 10.1       | Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota                               |   |                                   |

| No    | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator  | Sumber Pendanaan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------|--|--|------------------|-----------------------------------|
| 10.1  | Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota  | Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)               |                  |                                   |
| 10.2. | <b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>   |  |                  |                                   |
| 10.2  | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota   | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) |                  |                                   |
| 10.2  | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara  |                  |                                   |

| No         | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator  | Sumber Pendanaan                                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab           |
|------------|---|--|---|---|
| 10.2       | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                         |   |   |
| 10.2       | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota   | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                   |   |   |
| <b>11.</b> | <b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>   |  | <b>APBN/APBD PROVINSI/APBD</b>                    | <b>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota</b> |
| 11.1.      | <b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b> |  | <b>KOTA/Dana lain yang sah dan tidak mengikat</b> | <b>Tanjungpinang</b>                        |
| 11.1       | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri                         | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri |   |   |
| 11.1       | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar  | Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri  |   |   |

| No         | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator  | Sumber Pendanaan  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |
|------------|---|--|---|---|
|            | Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota  |  |   |   |
| 11.1       | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri                                     | Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri                               |   |   |
| <b>12.</b> | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>                                    |  | <b>APBN/APBD PROVINSI/APBD KOTA/Dana lain yang sah dan tidak mengikat</b> | <b>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang</b> |
| 12.1.      | <b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b> |  |   |   |
| 12.1       | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar                                  | Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya                |   |   |
| 12.1       | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata                                | Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata |   |   |

| No    | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator  | Sumber Pendanaan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------|--|--|------------------|-----------------------------------|
| 12.1  | Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata                             | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata                |                  |                                   |
| 12.1  | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif     |                  |                                   |
| 12.1  | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif                 | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif |                  |                                   |
| 12.2. | <b>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</b>                                   |  |                  |                                   |
| 12.2  | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif                          | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif                        |                  |                                   |
| 12.2  | Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha                   | Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha                        |                  |                                   |

| No    | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator   | Sumber Pendanaan  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                |
|-------|---|---|---|--|
| 13.   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>   |   | <b>APBN/APBD PROVINSI/APBD KOTA/Dana lain yang sah dan tidak mengikat</b> | <b>Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang</b> |
| 13.1. | <b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>   |   |   |  |
| 13.1  | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)   | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota        |   |  |
| 13.1  | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati  | Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola |   |  |
| 14.   | <b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>                         |   | <b>APBN/APBD PROVINSI/APBD KOTA/Dana lain yang sah dan tidak mengikat</b> | <b>Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang</b> |
| 14.1. | <b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah</b> |   |   |  |

| No         | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator  | Sumber Pendanaan                                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  |
|------------|--|--|---|------------------------------------|
|            | <b>Kabupaten/Kota</b>  |  |   |                                    |
| 14.1       | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup   | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan  |   |                                    |
| 14.1       | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup                                 | Jumlah Masyarakat /Kelompok Masyarakat /Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat  |   |                                    |
| <b>15.</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>   |  | <b>APBN/APBD PROVINSI/APBD</b>                    | <b>Dinas Lingkungan Hidup Kota</b> |
| 15.1.      | <b>Pengelolaan Sampah</b>  |  | <b>KOTA/Dana lain yang sah dan tidak mengikat</b> | <b>Tanjungpinang</b>               |
| 15.1       | Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali                            |   |                                    |
| 15.1       | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan                         | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat |   |                                    |

| No   | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator   | Sumber Pendanaan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|---|------------------|-----------------------------------|
| 15.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada |                  |                                   |
| 15.1 | Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah   | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota  |                  |                                   |
| 15.1 | Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan,                          | Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di  |                  |                                   |

| No         | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator   | Sumber Pendanaan  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                             |
|------------|--|---|---|---|
|            | Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST /SPA Kabupaten /Kota     | TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota   |   |   |
| 15.1       | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota     | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir |   |   |
| <b>16.</b> | <b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>  |   | <b>APBN/APBD PROVINSI/APBD KOTA/Dana lain yang sah dan tidak mengikat</b> | <b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjungpinang</b> |
| 16.1.      | <b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota</b>                |   |   |   |
| 16.1       | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                     |   |   |

| No    | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator  | Sumber Pendanaan   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                        |
|-------|--|--|--|--|
| 17.   | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>   |  | <b>APBN/APBD PROVINSI/APBD KOTA /Dana lain yang sah dan tidak mengikat</b> |  |
| 17.1  | <b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>   |  |  |  |
| 17.1  | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan   | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan               |  |  |
| 18.   | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>  |  | <b>APBN/APBD PROVINSI/APBD KOTA/Dana lain yang sah dan tidak mengikat</b>  | <b>Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota</b> |
| 18.1. | <b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> |  |  | <b>Tanjungpinang</b>                                     |
| 18.1  | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian |  |  |

| No    | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator   | Sumber Pendanaan  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                      |
|-------|---|---|---|--|
| 19.   | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>   |   | <b>APBN/APBD PROVINSI/APBD KOTA/Dana lain yang sah dan tidak mengikat</b> | <b>Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang</b> |
| 19.1. | <b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b> |   |   |  |
| 19.1  | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro  | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro                       |   |  |
| 19.1  | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro   | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro |   |  |
| 19.1  | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan   | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha  |   |  |

| No         | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator   | Sumber Pendanaan   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                      |
|------------|---|---|--|--|
|            | Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan  | Mikro dan Kewirausahaan   |  |  |
| <b>20.</b> | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>  |   | <b>APBN/APBD PROVINSI/ APBD</b>  | <b>Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota</b>               |
| 20.1.      | <b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>                                      |   | <b>KOTA/Dana lain yang sah dan tidak mengikat</b>                          | <b>Tanjungpinang</b>   |
| 20.1       | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi |  |  |
| <b>21.</b> | <b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>   |   | <b>APBN/APBD PROVINSI/ APBD KOTA/Dana lain yang sah dan tidak mengikat</b> | <b>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota</b> |
| 21.1.      | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian</b>   |   |  | <b>Tanjungpinang</b>   |

| No         | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator  | Sumber Pendanaan  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                      |
|------------|--|--|---|--|
|            | <b>dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>  |  |   |  |
| 21.1       | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian |   |  |
| <b>22.</b> | <b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>   |  | <b>APBN/APBD PROVINSI/APBD</b>  | <b>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota</b> |
| 22.1       | <b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>                                    |  | <b>KOTA/Dana lain yang sah dan tidak mengikat</b>                         | <b>Tanjungpinang</b>   |
| 22.1       | Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan   |  |   |  |
| 22.1       | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup   |  |   |  |
| <b>23.</b> | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                     |  | <b>APBN/APBD PROVINSI/APBD KOTA/Dana lain yang sah dan tidak mengikat</b> | <b>Kecamatan Tanjungpinang Kota</b>                                    |
| 23.1       | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                         |  |   |  |

| No   | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator   | Sumber Pendanaan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|------------------|-----------------------------------|
| 23.1 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                  |                                   |

Sumber: Hasil Analisis, 2022

WALI KOTA TANJUNGPINANG

**ttd.**

RAHMA

Salinan ini sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



LIA ADHAYATNI, SH.,MH  
Pembina  
NIP. 19781109 200604 2 021